

LAPORAN KINERJA 2019



KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR



DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya atas tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2019.

Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara yang berisi capaian program dan kegiatan KKP Kelas I Makassar.

Laporan ini memberikan gambaran secara umum capaian kinerja KKP Kelas I Makassar yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran guna peningkatan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar pada tahun berikutnya.

Makassar, Maret 2020

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Makassar,



dr. Darmawali Handoko, M. Epid
NIP. 196911252002121003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar berdasarkan capaian indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 telah ditandatangani oleh Kepala KKP Kelas I Makassar selaku Pihak Pertama dan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI sebagai pihak kedua. Perjanjian kinerja tahun 2019 terdapat 12 (dua belas) indikator yang harus dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator tahun 2019 berbeda dengan indikator tahun sebelumnya yang berjumlah 14 (empat belas).

Adapun 12 indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan dengan target 15.715 sertifikat.
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP dengan target 100 %.
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dengan target 1.253 dokumen.
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus dengan target 9 lokasi.
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah dengan target 4 lokasi.
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan dengan target 41.630 sertifikat.
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi dengan target 7 lokasi.
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area dengan target 7 lokasi.
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung dengan target 2.325 orang.
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan target 48 dokumen.
11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P dengan target 17 jenis.
12. Jumlah pengadaan sarana prasarana dengan target 232 unit.

Terdapat tiga capaian indikator yang mencapai 100 %, delapan indikator yang mencapai di atas 100 %, namun juga terdapat satu indikator dengan capaian

85,71 %. Indikator yang belum tercapai adalah jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi, dari 7 lokasi yang menjadi target, hanya 6 lokasi yang memenuhi syarat sanitasi.

Pencapaian target indikator yang telah ditetapkan KKP Kelas I Makassar tahun 2019 bersumber dari pagu sebesar Rp. 30.351.307.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.565.479.751,- atau sebesar 97,41 %.

Dalam laporan kinerja ini KKP Kelas I Medan dijadikan sebagai pembanding capaian kinerja untuk ke 12 indikator kinerja, hal ini karena KKP Kelas I Medan dan KKP Kelas I Makassar memiliki karakteristik yang hampir sama, meliputi :

1. Klasifikasi kelas yang sama yaitu kelas I;
2. Lingkup kawasan yang memiliki Pelabuhan Laut dan Bandar Udara;
3. Melayani embarkasi/debarkasi haji.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik.....	vii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Visi dan Misi	
E. Struktur Organisasi	4
F. Sumber Daya	
G. Permasalahan Utama Organisasi.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	15
A. Perencanaan Kinerja.....	15
1. Rencana Aksi Kegiatan	15
2. Rencana Kinerja Tahunan.....	21
B. Perjanjian Kinerja.....	23
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	25
A. Pengukuran Kinerja	25
B. Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2019.....	27
BAB IV Penutup	108
Pustaka Acuan	109
Penyusun	110
Lampiran	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 6

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Indikator Kinerja RAK KKP Kelas I Makassar tahun 2015.....	17
Tabel II.2	Indikator Kinerja RAK KKP Kelas I Makassar tahun 2016 dan 2017	19
Tabel II.3	Indikator Kinerja RAK KKP Kelas I Makassar tahun 2018 dan 2019	20
Tabel II.4	Indikator Kinerja RKT KKP Kelas I Makassar Tahun 2019.....	22
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019.....	24
Tabel II.6	Anggaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	24
Tabel III.1	Pengukuran Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 dan Indikator serta Target RAP Ditjen P2PTahun 2019	26
Tabel III.2	Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Jumlah Sertiikat Alat Angkut KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	28
Tabel III.3	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Pertama Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	30
Tabel III.4	Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	34
Tabel III.5	Perbandingan RAP dan RAK Indikator Kedua KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	34
Tabel III.6	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kedua Perjanjian Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019.....	36
Tabel III.7	Distribusi Puskesmas Buffer Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	37
Tabel III.8	Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Indikator Kedua Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019.....	38
Tabel III.9	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Ketiga Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	39
Tabel III.10	RAP, RAK dan Realisasi Indikator Keempat KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	43
Tabel III.11	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Keempat Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	43
Tabel III.12	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kelima Perjanjian	

	Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	47
Tabel III.13	Jumlah Sertifikat/Surat Keterangan Kesehatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	49
Tabel III.14	RAP, RAK dan Realisasi Kinerja Indikator Keenam KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	52
Tabel III.15	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Keenam Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	52
Tabel III.16	Distribusi Hasil Pemeriksaan TPM di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	55
Tabel III.17	Distribusi Hasil Pemeriksaan Tempat Penyediaan Air Bersih di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019.....	56
Tabel III.18	Distribusi Hasil Pemeriksaan Tempat Tempat Umum di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019.....	57
Tabel III.19	Jumlah Pelabuhan dan Bandara Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	58
Tabel III.20	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Ketujuh Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	61
Tabel III.21	Nilai Indeks di Wilayah Kerja Bandara Hasanuddin KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	63
Tabel III.22	Nilai Indeks di Wilayah Kerja Pelabuhan Makassar KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	65
Tabel III.23	Nilai Indeks di Wilayah Kerja Pelabuhan Bajoe KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	67
Tabel III.24	Nilai Indeks di Wilayah Kerja Pelabuhan Parepare KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	69
Tabel III.25	Nilai Indeks di Wilayah Kerja Pelabuhan Palopo KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	71
Tabel III.26	Nilai Indeks di Wilayah Kerja Pelabuhan Awerange KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	72
Tabel III.27	Nilai Indeks di Wilayah Kerja Pelabuhan Malili KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	74
Tabel III.28	RAP, RAK dan Realisasi Tahun 2019 Indikator Kedelapan KKP Kelas I Makassar	76
Tabel III.29	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kedelapan Perjanjian	

	Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	81
Tabel III.30	Pemeriksaan PML KKP Kelas I Makassar dalam Periode Tahun 2017-2019	83
Tabel III.31	RAP, RAK dan Realisasi Tahun 2019 Indikator Kesembilan KKP Kelas I Makassar	84
Tabel III.32	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kesembilan Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	86
Tabel III.33	Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Indikator Keduabelas Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	88
Tabel III.34	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kesepuluh Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	93
Tabel III.35	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kesebelas Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	99
Tabel III.36	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Keduabelas Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	103
Tabel III.37	Realisasi Anggaran Belanja DIPA/RKAKL pada KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	105
Tabel III.38	Tanah dan Bangunan KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	106
Tabel III.39	Kendaraan Bermotor dan Alat Bermotor Lainnya KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	107

DAFTAR GRAFIK

Grafik	III.1	Perbandingan Capaian Indikator Ke-1 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan	29
Grafik	III.2	Perbandingan Capaian Indikator Ke-2 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan.....	35
Grafik	III.3	Perbandingan Capaian Indikator Ke-3 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan.....	38
Grafik	III.4	Perbandingan Capaian Indikator Ke-4 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan	41
Grafik	III.5	Perbandingan Capaian Indikator Ke-5 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan.....	45
Grafik	III.6	Perbandingan Sertifikat atau Surat Keterangan Kesehatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2015-2019	48
Grafik	III.7	Perbandingan Capaian Indikator Ke-6 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan.....	79
Grafik	III.8	Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Jumlah Pelabuhan dan Bandara yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2019	54
Grafik	III.9	Perbandingan Capaian Indikator Ke-7 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan.....	54
Grafik	III.10	Perbandingan Capaian Indikator Ke-8 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan	76
Grafik	III.11	Pemeriksaan PML dalam Kurun Tahun 2017-2019	83
Grafik	III.12	Perbandingan Capaian Indikator Ke-9 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan	84
Grafik	III.13	Perbandingan Capaian Indikator Ke-10 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan	91
Grafik	III.14	Perbandingan Capaian Indikator Ke-11 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan	98
Grafik	III.15	Perbandingan Capaian Indikator Ke-12 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (Lapkin) yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan rencana kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan. Lapkin disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Petunjuk Teknis dari Perpres tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan KKP Kelas I Makassar tahun 2019 sesuai dengan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2015-2019 Revisi November 2019. Dalam RAK revisi tahun 2019 tersebut terdapat pengurangan indikator penilaian kinerja yang pada tahun 2018 berjumlah 14 menjadi 12 indikator di tahun 2019, 2 indikator yang tidak diperhitungkan adalah jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu dan jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP, hal ini dikarenakan anggaran untuk Penyakit Tidak Menular (PTM) tidak ada untuk KKP sesuai dengan petunjuk perencanaan (Jukren) tahun 2019. Juga untuk indikator ke 12 tentang pengadaan sarana prasarana dengan target awal sebanyak 4 paket berubah menjadi 232 unit, serta penambahan DIPA dari Rp. 26.660.063.000,- menjadi Rp. 30.351.307.000,-. RAK berisi target yang harus dicapai oleh KKP Kelas I Makassar karena merupakan gambaran keberhasilan dari kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2019 terdapat 4 (empat) kegiatan untuk KKP Kelas I Makassar yaitu :

1. Surveilans dan karantina kesehatan;

2. Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik;
3. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung;
4. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut didasari dengan 12 indikator yaitu :

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
12. Jumlah pengadaan sarana prasarana

Capaian indikator tersebut akan dibahas dan dianalisa dalam bentuk laporan yaitu Laporan Kinerja (Lapkin) KKP Kelas I Makassar tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang memuat pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019.

Laporan kinerja berisi gambaran kegiatan tahun 2019 yang memuat target serta capaian kinerja atas indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala KKP Kelas I Makassar dan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

Adapun tujuan dari KKP Kelas I Makassar adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Mewujudkan pelabuhan dan bandara sehat melalui upaya cegah tangkal penyakit potensial wabah, pengendalian faktor risiko penyakit dan pelayanan kesehatan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah;
- b. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini (SKD) KLB penyakit menular dan penyakit menular potensial wabah;
- c. Mengendalikan faktor risiko penyakit dari angkutan beserta muatannya;
- d. Mengendalikan faktor risiko lingkungan pelabuhan dan bandara;
- e. Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 dan Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011; Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kantor Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas darat negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

D. VISI DAN MISI

Tidak terdapat visi dan misi yang tercantum dalam RAP Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sehingga mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia, yaitu : “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui tujuh misi pembangunan yaitu :

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tata kerja KKP Kelas I Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011; Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar terdiri atas :

1. Bagian Tata Usaha terdiri dari dua sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Program dan Laporan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Umum
2. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi terdiri dari dua seksi yaitu :

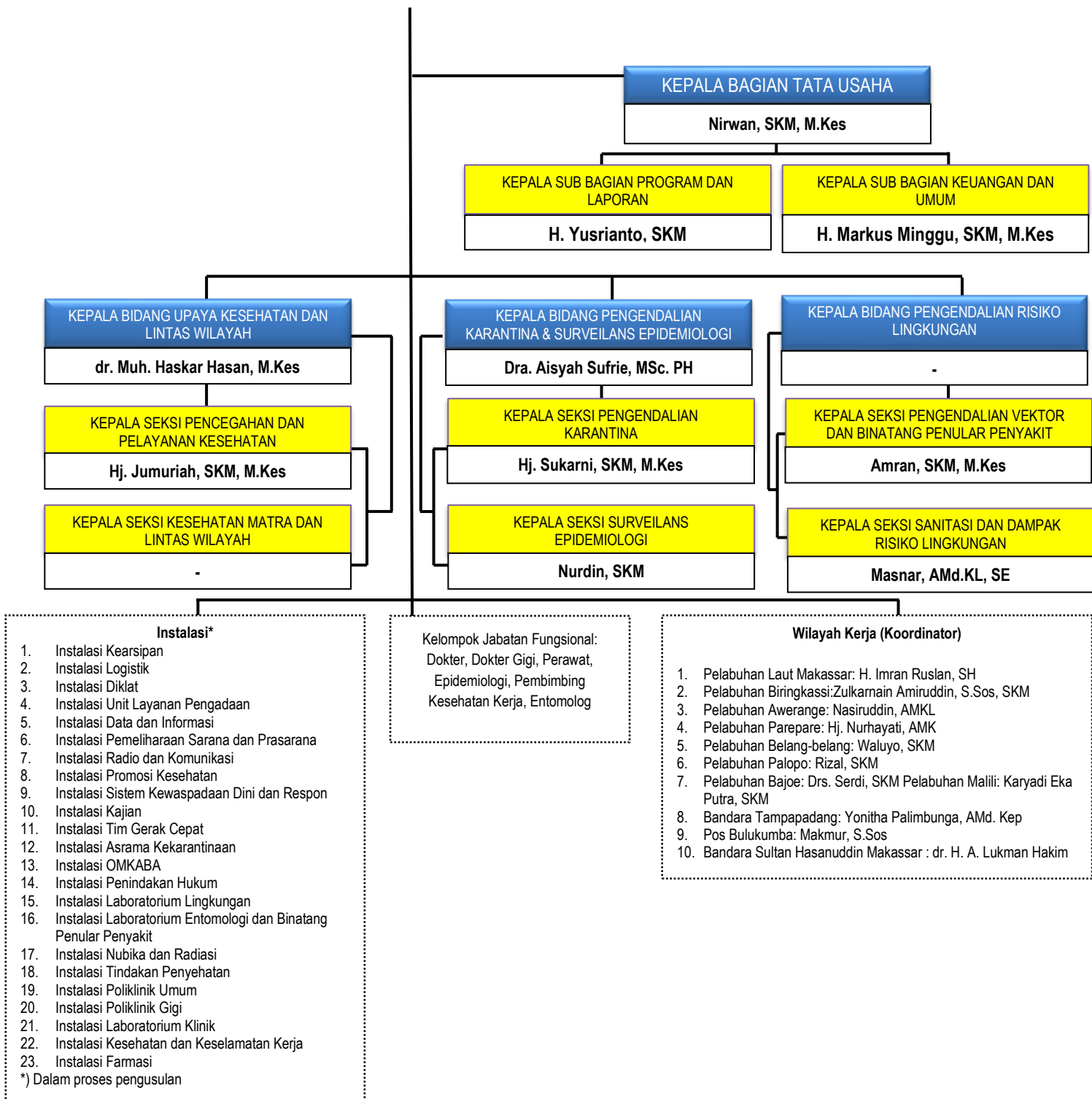
- a. Seksi Pengendalian Karantina
- b. Seksi Surveilans Epidemiologi
3. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan terdiri dari dua seksi Yaitu :
 - b. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit
 - c. Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan
4. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah terdiri dari dua seksi yaitu:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan
 - b. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah
5. Wilayah Kerja
6. Instalasi
7. Kelompok jabatan fungsional

Jabatan Kepala Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan masih dijabat oleh Plt. Yusrianto, SKM, sejak tahun 2018 sampai sekarang, begitu pula dengan Kepala Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah masih dijabat oleh Plt. Dr. Andi Lukman Hakim Amin.

Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar tahun 2019 lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

KEPALA KANTOR

dr. Darmawali Handoko, M.Epid



Gambar I.1
Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2019
Uraian tugas masing-masing bagian dan bidang adalah :

1. Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Program dan Laporan
 - 1) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program
 - 2) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan
 - 3) Menyebarkan informasi
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Umum
 - 1) Melaksanakan Urusan Akuntansi, Verifikasi serta Mobilisasi Dana
 - 2) Melaksanakan Urusan Tata Usaha
 - 3) Melaksanakan Urusan Kepegawaian
 - 4) Melaksanakan Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga
 - 5) Penyiapan Penyelenggaraan Pelatihan
2. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
- a. Seksi Pengendalian Karantina
 - 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi OMKABA ekspor dan impor
 - 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pengawasan kekarantinaan terhadap kapal, pesawat udara dan alat transportasi lainnya.
 - 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan tindakan kekarantinaan terhadap kapal, pesawat udara dan alat transportasi lainnya.
 - 4) Penerbitan dokumen kesehatan kapal laut, pesawat udara dan alat transportasi lainnya.
 - 5) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengangkutan orang sakit/jenazah.
 - 6) Kajian di bidang kekarantinaan
 - 7) Pengembangan teknologi di bidang kekarantinaan
 - 8) Pendidikan dan pelatihan di bidang kekarantinaan
 - b. Seksi Surveilans Epidemiologi

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit.
- 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit potensial wabah.
- 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali.
- 4) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan jejaring kerja surveilans epidemiologi nasional/internasional.
- 5) Kesiapsiagaan KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan
- 6) Pengkajian KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan
- 7) Advokasi KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan
- 8) Penanggulangan KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan

3. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan

a. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan serangga penular penyakit.
- 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan tikus dan pinjal.
- 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan pestisida.
- 4) Kajian dan diseminasi informasi bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.
- 5) Pengembangan jejaring kerja bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.

- 6) Pengembangan kemitraan bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.
- 7) Pengembangan teknologi bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.
- 8) Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.

b. Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan

- 1) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih.
- 2) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan makanan dan minuman.
- 3) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan hygiene dan sanitasi kapal laut dan pesawat.
- 4) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan hygiene dan sanitasi gedung/bangunan.
- 5) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pencemaran udara, air dan tanah.
- 6) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih.
- 7) Kajian dan diseminasi informasi bidang sanitasi lingkungan
- 8) Pengembangan jejaring kerja dan kemitraan bidang sanitasi lingkungan
- 9) Pengembangan teknologi bidang sanitasi lingkungan
- 10) Pendidikan dan pelatihan bidang sanitasi lingkungan

4. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah

a. Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelayanan pengujian kesehatan nakhoda, anak buah kapal dan penumpang makanan.
- 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pengawasan obat/P3K di kapal/pesawat/alat transportasi lainnya.
- 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelayanan kajian ergonomik.
- 4) Advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja
- 5) Pengembangan jejaring kerja di bidang kesehatan kerja
- 6) Pengembangan kemitraan bidang kesehatan kerja
- 7) Pengembangan teknologi bidang kesehatan kerja
- 8) Pelatihan teknis bidang kesehatan kerja

b. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional (ICV)
- 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah
- 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan kesehatan matra
- 4) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan kesehatan haji
- 5) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan perpindahan penduduk
- 6) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana

- 7) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan terbatas
- 8) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan rujukan gawat darurat medik.
- 9) Pengembangan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan matra
- 10) Pengembangan teknologi bidang kesehatan matra
- 11) Pelatihan teknis bidang kesehatan matra.

5. Instalasi

Instalasi dimaksudkan guna mendukung program yang dilakukan oleh KKP Kelas I Makassar. Menindaklanjuti hasil kesepakatan pertemuan pengisian aplikasi ABK *Online* UPT di lingkungan Ditjen P2P tanggal 27 dan 28 November 2017 dimana salah satu kesepakatannya adalah untuk mengirimkan usulan instalasi, maka KKP Kelas I Makassar mengusulkan instalasi sesuai dengan Surat Kepala KKP Kelas I Makassar Nomor OT.03.02/1.2/4778/2017 tanggal 4 Desember 2017 sebagai berikut:

- a. Instalasi Kearsipan
- b. Instalasi Logistik
- c. Instalasi Diklat
- d. Instalasi Unit Layanan Pengadaan
- e. Instalasi Data dan Informasi
- f. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- g. Instalasi Radio dan Komunikasi
- h. Instalasi Promosi Kesehatan
- i. Instalasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
- j. Instalasi Kajian
- k. Instalasi Tim Gerak Cepat
- l. Instalasi Asrama Kekarantinaan
- m. Instalasi OMKABA
- n. Instalasi Penindakan Hukum
- o. Instalasi Laboratorium Lingkungan

- p. Instalasi Laboratorium Entomologi dan Binatang Penular Penyakit
- q. Instalasi Nubika dan Radiasi
- r. Instalasi Tindakan Penyehatan
- s. Instalasi Poliklinik Umum
- t. Instalasi Poliklinik Gigi
- u. Instalasi Laboratorium Klinik
- v. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- w. Instalasi Farmasi

Saat ini instalasi yang diusul di atas belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Dirjen P2P Kemenkes RI.

F. SUMBER DAYA

Dalam mencapai kinerjanya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar didukung oleh beberapa sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar berdasarkan data SIMKA tahun 2019 sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) orang PNS dan ditambah tenaga Non PNS berdasarkan data RKAKL 2019 yakni satpam sebanyak 9 orang, sopir sebanyak 12 orang, cleaning service sebanyak 10 orang, pramubakti sebanyak 4 orang.

a. Menurut Jabatan:

1) PNS	=	134 orang
a) Jabatan Struktural	=	11 orang
b) Jabatan Fungsional Teknis	=	26 orang
c) Jabatan Pelaksana	=	97 orang
2) Non PNS	=	35 orang
a) Pengamanan Kantor (Satpam)	=	9 orang
b) Pengemudi (Sopir)	=	12 orang
c) Cleaning Service	=	10 orang
d) Pramubakti	=	4 orang

Tabel di bawah ini menunjukkan pengelompokan PNS berdasarkan jabatan.

Tabel I.1 Jabatan Struktural KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No.	Pejabat Struktural	Jumlah (Orang)
1.	Kepala KKP Kelas I Makassar	1
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	1
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan & Umum	1
4.	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan	1
5.	Kepala Bidang Pengendalian Karantina & Surveilans Epidemiologi	1
6.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina	1
7.	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi	1
8.	Kepala Bidang Pengendalian Resiko Lingkungan	-
9.	Kepala Seksi Pengendalian Vektor & Binatang Penular Penyakit	1
10.	Kepala Seksi Sanitasi & Dampak Risiko Lingkungan	1
11.	Kepala Bidang Upaya Kesehatan & Lintas Wilayah	1
12.	Kepala Seksi Pencegahan & Pelayanan Kesehatan	1
13.	Kepala Seksi Kesehatan Matra & Lintas Wilayah	-
Jumlah		11

Tabel I.2 Jabatan Fungsional Teknis KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No.	Fungsional Tertentu	Jumlah (Orang)
1.	Dokter Ahli Madya (JFT)	3
2.	Dokter Gigi Ahli Madya (JFT)	1
3.	Dokter Ahli Muda (JFT)	3
4.	Perawat Ahli Madya (JFT)	1
5.	Perawat Penyelia (JFT)	1
6.	Perawat Ahli Pertama (JFT)	5
7.	Perawat Mahir (JFT)	4
8.	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JFT)	2
9.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	1
10.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	4
11.	Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	1
Jumlah		26

Tabel I.3 Jabatan Fungsional Umum KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No.	Fungsional Umum	Jumlah (Orang)
1.	Dokter	14
2.	Perawat Ahli	2
3.	Perawat	19
4.	Pranata Laboratorium Kesehatan	4
5.	Sanitarian Ahli	9
6.	Sanitarian	8
7.	Epidemiolog Kesehatan Ahli	10
8.	Epidemiolog	1
9.	Entomolog Kesehatan Ahli	2
10.	Entomolog Kesehatan	8
11.	Bendahara	2
12.	Analisis Keuangan	2
13.	Pengadministrasi Keuangan	2
14.	Perencana	4
15.	Analisis Kepegawaian Ahli	3
16.	Pengelola Barang Milik Negara	4
17.	Pengelola Data	2
18.	Arsiparis	1
Jumlah		97

b. Menurut Golongan:

- 1) Golongan II = 20 orang
- 2) Golongan III = 92 orang
- 3) Golongan IV = 22 orang

c. Menurut Pendidikan:

- 1) S2 = 46 orang
- 2) S1 = 45 orang
- 3) DIV = 3 orang
- 4) DIII = 36 orang
- 5) SMA = 4 orang

Jenis dan tingkat pendidikan tersebut menunjukkan kekuatan SDM di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar. Dengan proporsi SDM yang ada, masih perlu peningkatan kualitas terutama dalam pemahaman dan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan. Untuk itu selain melalui peningkatan

jenjang pendidikan formal, peningkatan kualitas SDM tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan teknis dan diskusi-diskusi teknis baik melalui pertemuan secara langsung maupun dengan memanfaatkan media sosial yang sedang berkembang sangat cepat saat ini.

2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Anggaran KKP Kelas I Makassar tahun 2019 sebesar Rp. 30.351.307.000,- dengan realisasi Rp. 29.565.479.751,- (97,41 %). Revisi DIPA dilakukan sebanyak 5 kali.

Tabel I.4 Realisasi Anggaran Belanja DIPA/RKAKL
Pada KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
30.351.307.000	29.565.479.751	97,41 %	785.827.249

Sumber : Data Keuangan, 2019

3. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Selain dukungan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran, dukungan sarana dan prasarana juga mutlak diperlukan dalam pencapaian indikator kinerja. Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana tersebut secara bertahap terus ditingkatkan, baik di kantor induk maupun di semua wilayah kerja. Jenis dan jumlah sarana/prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sampai 31 Desember 2019 adalah :

Tabel I.5 Tanah dan Bangunan KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No.	Nama Barang	Kuantitas (m ²)	Alamat
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol.II	120	Jl. Kebun Sayur Utara Kota Parepare
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol.II	204	Jl. Perumnas Toddopuli V No.9 Makassar
3	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4000	Dusun Baddo- Baddo Kec.Baji Mangngai Maros
4	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1230	Desa/Kec. Cappa Galung Kec.Bacukiki Parepare
5	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1360	Jl. Yos Sudarso Kel. Cellu Kec. Tanete Riattang Timur
6	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2531	Desa Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo
7	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	800	Kel.Mangempang Kec.Barru Kab.Barru
8	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1000	Jl. Pelabuhan Bira Kab. Bulukumba
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12,160	Jl. Poros Mamuju - Kalukku Sulawesi Barat
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	672	Jl. Bandara Lama Kab. Maros
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1000	Jl. Hatta No.3 Makassar (Pelabuhan Makassar)
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1718	Dusun Baddo- Baddo Kec.Baji Mangngai Maros
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	500	Desa/Kec. Cappa Galung Kec.Bacukiki Parepare
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	850	Desa Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	200,16	Jl. Yos Sudarso Kel. Cellu Kec. Tanete Riattang Timur
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	750	Jl. Poros Mamuju - Kalukku Sulawesi Barat
17	Rumah Negara Golongan II Type D	36	Jl. Kebun Sayur Utara Kota Parepare

Sumber : Data BMN 2019

Tabel I.6 Kendaraan Bermotor dan Alat Bermotor Lainnya

KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No.	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah (unit)
1	Station Wagon (Kendaraan Operasional Kepala KKP Kelas I Makassar)	Mitsubishi Pajero	1
2	Kendaraan Penumpang Lainnya (Bis Angkutan Pegawai KKP Kelas I Makassar)	Hino	1
3	Mobil Ambulance	Mitshubishi L300	1
4	Mobil Ambulance	Mitshubishi L200	1
5	Mobil Ambulance	Izusu NHR55	1
6	Mobil Ambulance	Suzuki APV	1
7	Mobil Ambulance	Suzuki APV Arena	1
8	Mobil Ambulance Emergency dan Mobil Ambulance Penyakit Menular	Toyota HI ACE	2
9	Mobil Ambulance	Suzuki APV Lexury	3
10	Mobil Ambulance	Izusu 120 PS	1
11	Kendaraan Taktis (Kendaraan Khusus Pengendalian Vektor)	Ford Ranger 2.9	1
12	Kendaraan Taktis (Kendaraan Survey Kesehatan Lingkungan dan Kendaraan Biarding)	Daihatzu Terios MT	2
13	Kendaraan Taktis (Kendaraan boarding)	Toyota Rush GM	1
14	Kendaraan Taktis (Kendaraan Khusus Laboratorium Mobile)	Nissan Evalia	1
15	Kendaraan Taktis (Kendaraan Boarding Bidang PKSE dan Kendaraan Khusus Matra)	Toyota Rush Seater	2
16	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2
17	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	2
18	Sepeda Motor	Honda Revo	2
19	Sepeda Motor	Suzuki Axelo	3
20	Sepeda Motor	Honda Beat	3
21	Perahu Karet Bermotor	-	1

Sumber : Data BMN, 2019

Tabel I.7 Peralatan Teknis

KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No.	Nama Barang	Jumlah (unit)
1	Evaluation Suhu	6
2	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	2
3	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	9
4	Alat Pengasapan	3
5	Minor Surgical Set (alat kedokteran umum)	1
6	Diagnostik Set	1
7	Resusitasi Dewasa	3
8	Suction Pump	3
9	Dental Chair	1
10	Dental Hand Instruments Set	1
11	Minor Surgery Set	4
12	Oxygen Regulator	1
13	Lampu Gynaecology	2
14	Audiometer (alat kedokteran THT)	1
15	Portable Diagnostic (alat kedokteran THT)	1
16	Soundproof box (alat kedokteran THT)	1
17	Diagnostic Audio Metre	1
18	Elektrocardiograph (ecg) 1 channel	2
19	Nebulizer	6
20	Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	2
21	Ventilator Internal Medicine	1
22	Defibrilator	8
23	Ekg set	1
24	Alat Pengukur Kadar Air	1
25	Water test Kit	4
26	Alat Laboratorium Microbiology Set	1
27	Hematology Analyzer	1
28	Food Processor	1
29	Alat uji analisa logam-logam (spektrofotometer)	1
30	Swing Fog	4
31	Thermal Scanner	4

Sumber : Data BMN, 2019

G. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) ORGANISASI

Beberapa permasalahan utama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar adalah sebagai berikut :

1. Tidak semua wilayah kerja memiliki gedung kantor sendiri sehingga harus menyewa ruangan.
2. Tenaga di wilker masih terbatas sedangkan kegiatan yang dilaksanakan mewakili semua bidang dan bagian yang ada di induk.
3. Penerapan sinkarkes online untuk pencetakan semua dokumen yang diterbitkan oleh KKP masih terkendala oleh jaringan internet di beberapa wilayah kerja dan masih terjadi *error* pada aplikasi sinkarkes sehingga masih membutuhkan dokumen manual melalui generate dokumen.
4. Tidak tercapainya target PNBK sehingga mengakibatkan penundaan beberapa kegiatan yang terkait dengan indikator perjanjian kinerja.
5. Belum adanya pengukuhan Pejabat Karantina untuk penindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika laporan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiappernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang meunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan mewujudkan kinerja organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan terdiri atas dua bagian yaitu Rencana Kerja Lima Tahun yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019.

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK)

RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen P2P Kemenkes RI. Olehnya itu, Kegiatan yang dilaksanakan di KKP harus mendukung program yang direncanakan pada Ditjen P2P.

Pada tahun 2015 indikator kinerja KKP Kelas I Makassar sebanyak 11 Indikator Kinerja Kegiatan dengan 42 Indikator Satker, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.1 Indikator Kinerja RAK
KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

No	IKK	Indikator Satker	Target 2015	
1	Persentase sinyal dini kewaspadaan yang direspon	1	Persentase penumpang yang datang dari daerah endemis dan diberikan Health alert card	100
		2	Persentase ABK/crew dan penumpang alat angkut yang diamati bebas dari penularan penyakit / PHEIC (KKMMD)	100
		3	Persentase penanggulangan KLB / PHEIC < 24 Jam	100
		4	Jumlah dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang diterbitkan	2
		5	Jumlah pelaku perjalanan internasional yang divaksinasi dan diterbitkan dokumen ICV	28000
		6	Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi khusus	60
		7	Jumlah lokasi pendampingan imunisasi dan legalisasi ICV Haji	29
		8	Jumlah lokasi wilayah kerja yang melaksanakan posko hari raya lebaran, natal dan tahun baru	7

22	Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaaan kesehatan	9	Prosentase kapal dari luar negeri langsung yang mendapatkan free pratique, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit	100
		10	Prosentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan HPAGD sesuai kondisi selama penerbangan dengan informasi yang benar	50
		11	Persentase sanitasi alat angkut yang memenuhi syarat kesehatan dalam rangka penerbitan HQC	80
		12	Persentase alat angkut yang terdapat tanda - tanda kehidupan vektor yang disinfeksi	70
		13	Persentase alat angkut yang terdapat tanda - tanda kehidupan tikus yang difumigasi	70
		14	Persentase alat angkut yang disinfeksi	80
		15	Prosentase kapal yang memiliki obat dan alat P3K yang sesuai standar/persyaratan	35
3	Persentase Pelabuhan/Bandar yang melakukan pengendalian vektor terpadu	16	Persentase wilker dengan CI <2 % di wilayah perimeter	60
		17	Angka kepadatan lalat	25
		18	Jumlah pemasangan perangkap	13000
		19	Index pinjal di wilayah perimeter	0,5
4	Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung	20	Prosentase pelabuhan/ bandara yang melayani alat angkut dari daerah endemis melaksanakan deteksi suhu tubuh	100
		21	Jumlah wilayah kerja yang memberikan layanan HIV AIDS/IMS di pelabuhan/ bandara	1
		22	Penemuan kasus dini HIV AIDS pada populasi berisiko termasuk konseling	3
5	Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skriining penyakit tidak menular	23	Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan monitoring faktor risiko PTM melalui posbindu PTM	1
		24	Prosentasi faktor risiko PTM yang terdeteksi	25
		25	Jumlah wilayah kerja/lokasi yang menerapkan KTR	3
6	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	26	Persentase sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi	70
		27	Persentase kualitas air minum/ air bersih yang memenuhi syarat	85
7	Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	28	Persentase industri perkantoran/tempat kerja yang memenuhi syarat sanitasi	75
		29	Persentase industri yang membuang air limbah memenuhi syarat baku mutu lingkungan	50
		30	Persentase sampel air limbah yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan	50
		31	Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	75
8	Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	32	Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki sertifikat laik sehat	50
		33	Persentase sampel makanan yang memenuhi syarat kesehatan	95

		34	Persentase penjamah makanan yang bekerja di wilayah pelabuhan telah mengikuti kursus penjamah makanan	50
9	Persentase Pelabuhan/Bandara sehat	35	Persentase lokasi yang melakukan program pelabuhan/bandara sehat	40
10	Hasil Penilaian SAKIP adalah AA	36	Persentase anggaran Tanpa Blokir pada DIPA	90
		37	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100
		38	Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan ketentuan	100
		39	Penyampaian Laporan Bulanan ke Pusat Tepat Waktu	10
		40	Persentase penyajian kegiatan melalui media website	30
11	Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya	41	Persentase Wilker yang memiliki aset tanah milik kemenkes	50
		42	Persentase Wilker yang memiliki gedung milik kemenkes	30

Pada tahun 2016, Indikator satker dinilai terlalu banyak sehingga dilakukan penyederhanaan terhadap indikator kinerja satker dari 42 menjadi 16 indikator, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2 Indikator Kinerja RAK KKP Kelas I Makassar Tahun 2016 dan 2017

No	IKK	Indikator Satker		Target	
				2016	2017
1	Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	1	Persentase ABK/crew dan penumpang alat angkut yang datang dari luar negeri dilakukan pengamatan	100	100
		2	Persentase penanggulangan KLB / PHEIC < 24 Jam	100	100
2	Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan	3	Persentase kapal dari luar negeri langsung yang mendapatkan free pratique, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit	100	100
		4	Persentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan HPAGD sesuai kondisi selama penerbangan dengan informasi yang benar	55	60
3	Persentase Pelabuhan/Bandar yang melakukan pengendalian vektor terpadu	5	Persentase wilker yang melakukan pengendalian vektor terpadu di wilayah perimeter	100	100
		6	Persentase wilker yang melakukan pengendalian binatang penular penyakit di wilayah perimeter	70	80
4	Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung	7	Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung	30	70

5	Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular	8	Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular	50	60
6	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	9	Persentase sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi	70	80
		10	Persentase sampel air minum/ air bersih yang memenuhi syarat berdasarkan hasil laboratorium	80	90
7	Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	11	Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	80	90
8	Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	12	Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki sertifikat laik sehat	50	50
9	Persentase Pelabuhan/Bandara sehat	13	Persentase wilker yang melaksanakan program pelabuhan/bandara sehat	40	50
10	Hasil Penilaian SAKIP adalah AA	14	Hasil Penilaian SAKIP	AA	AA
11	Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarannya	15	Persentase Wilker yang memiliki gedung milik kemenkes	45	45
		16	Persentase Wilker yang memiliki kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus	55	64

Pada tahun 2018 indikator kinerja mengalami perubahan dan berbeda dari target tahun sebelumnya. Indikator ini merupakan indikator yang telah distandarkan untuk semua Kantor Kesehatan Pelabuhan. Ada 14 indikator yang menjadi penilaian terhadap kinerja KKP Kelas I Makassar yakni dapat dilihat pada tabel :

Tabel II.3 Indikator Kinerja RAK
KKP Kelas I Makassar Tahun 2018 dan 2019

No	Indikator Kinerja	Target	
		2018	2019
1	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	16402 Sertifikat	15715 Sertifikat
2	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100%	100%
3	Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	1383 Dokumen	1253 Dokumen
4	Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	9 Lokasi	9 Lokasi
5	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	3 Lokasi	4 Lokasi

6	Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	75000 Sertifikat	41630 Sertifikat
7	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	6 Lokasi	7 Lokasi
8	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	6 Lokasi	7 Lokasi
9	Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	3630 Orang	2325 Orang
10	Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu	7 Lokasi	-
11	Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP	20 Tempat Kerja	-
12	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40 Dokumen	48 Dokumen
13	Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	16 Jenis	17 Jenis
14	Jumlah pengadaan sarana prasarana	8 Unit	232 Unit

Indikator kinerja untuk tahun 2019 hanya 12 indikator yang ditargetkan oleh KKP Kelas I Makassar, 2 indikator yang tidak diperhitungkan adalah jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu dan jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP, hal ini dikarenakan anggaran untuk Penyakit Tidak Menular (PTM) tidak ada untuk KKP sesuai dengan petunjuk perencanaan (Jukren) tahun 2019.

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

RKT merupakan penjabaran atau turunan dari RAK tahun 2015-2019. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam rangkaian lima tahun Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Rencana Kinerja Tahunan kemudian menjadi acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam rencana kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2019, telah disusun indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Tabel II.4 Indikator Kinerja RKT
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	15.715 Sertifikat
		2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100%
		3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	1.253 Dokumen
		4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	9 Lokasi
		5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	4 Lokasi
		6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	41.630 Sertifikat
		7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	7 Lokasi
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic	8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	7 Lokasi
3	Menurunnya penyakit menular langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	2.325 Orang
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	48 Dokumen
		11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	17 Jenis
		12. Jumlah pengadaan sarana prasarana	232 Unit

Sumber Data : RKT KKP Kelas I Makassar 2019

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah yaitu Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sebagai tanda kesanggupan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah yaitu Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selaku atasan langsung untuk persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel II.5 pada halaman berikut :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	15.715 Sertifikat
		2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100%
		3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	1.253 Dokumen
		4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	9 Lokasi
		5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	4 Lokasi
		6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	41.630 Sertifikat
		7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	7 Lokasi
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic	8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	7 Lokasi
3	Menurunnya penyakit menular langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	2.325 Orang
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	48 Dokumen
		11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	17 Jenis
		12. Jumlah pengadaan sarana prasarana	232 Unit

Tabel II.6 Anggaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran
1	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Rp. 4.495.042.000,-
2	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Rp. 1.331.900.000,-
3	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Rp. 239.382.000,-

4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 24.284.983.000,-
Total		Rp. 30.351.307.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Untuk mengetahui peningkatan kinerja, maka dilakukan pengukuran terhadap indikator yang telah ditetapkan dan dibandingkan dengan target serta membandingkannya dengan hasil tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja indikator tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi data capaian.

Hasil pengukuran kinerja diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan tupoksi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RAK dan Perjanjian Kinerja.

Sasaran yang akan dicapai dalam indikator kinerja yakni :

1. Meningkatnya kegiatan surveilans dan karantina kesehatan;
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis;
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung;
4. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Adapun indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar tahun 2019 tertera dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.1 Pengukuran Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 dan Indikator serta target RAP Ditjen P2P Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Indikator RAP Ditjen P2P	KKP Kelas I Makassar		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan sebesar 100%	15.715 Sertifikat	16.816 sertifikat	107,01 %
2	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota sebesar 100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	Persentase penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan sebesar 100%	1.253	1.533	122,35%
4	Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	Persentase Pelabuhan, Bandara, dan Pos Lintas Batas Darat yang melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100 %	9 lokasi	12 lokasi	133,33 %
5	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah		4 lokasi	4 lokasi	100%
6	Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan		41.630 sertifikat	65.472 sertifikat	157,27 %
7	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	Persentase faktor risiko kesehatan yang dikendalikan di pelabuhan, bandar udara, dan Pos Lintas Batas Darat sebesar 100%	7 lokasi	6 lokasi	85,71 %
8	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang bebas dari faktor risiko penyakit tular vektor sebesar 100%	7 lokasi	7 lokasi	100%
9	Jumlah orang yang melakukan skrining	Persentase deteksi dini penyakit menular langsung	2.325 orang	2.720 orang	116,99 %

	penyakit menular langsung	Pelabuhan/Bandar Udara/PLBD sebesar 100%			
10	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	Persentase Satker Program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi sebesar 100 %	48 dokumen	49 dokumen	102,08 %
11	Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil AA	17 jenis	19 jenis	111,76 %
12	Jumlah pengadaan sarana prasarana	Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar sebesar 69%	232 unit	233 unit	100,43 %
Rata-Rata Capaian					111,41 %

Berdasarkan tabel III.1 di atas terdapat 1 (satu) indikator yang belum tercapai oleh KKP Kelas I Makassar yaitu indikator keenam yaitu Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi hanya mencapai 85,71 %, 8 (delapan) indikator di atas 100 % dan 3 (tiga) indikator dengan capaian 100 % .

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Capaian indikator tahun 2019 akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut :

1. INDIKATOR PERTAMA

Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

Target jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan pada tahun 2019 adalah sebanyak 15.715 sertifikat yang terdiri dari :

PHQC sebanyak 14.686 sertifikat serta SSCEC dan SSCC sebanyak 1.029 sertifikat.

a. Capaian Kinerja Organisasi

- 1) Pengertian

Jumlah penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan (PHQC, SSSC, SSCEC dan P3K) bagi alat angkut dalam periode satu tahun di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar.

2) Definisi Operasional

Jumlah pemeriksaan alat angkut dalam rangka penerbitan dokumen PHQC, SSCEC/SSCC sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan dalam periode satu tahun.

3) Rumus (cara perhitungan)

Akumulasi jumlah hasil sertifikat PHQC, SSCEC, SSSC dan P3K dalam satu tahun

$$\frac{\text{Jumlah sertifikat alat angkut yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target penerbitan sertifikat alat angkut}} \times 100\%$$

4) Capaian Kinerja

$$\frac{16.816}{15.715} \times 100\% = 107,01 \%$$

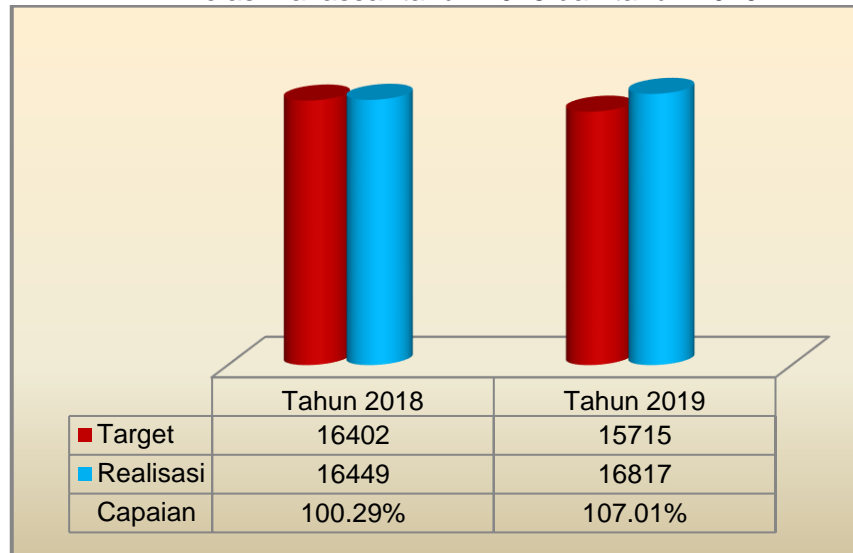
Pada tabel berikut ini digambarkan capaian indikator terhadap target yang ditetapkan

Tabel III.2 Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Jumlah Sertifikat Alat Angkut KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Item	Target RAP	Target RAK	Realisasi	Capaian
1	Sertifikat PHQC	100 %	14.686	14.728	203,01 %
2	Sertifikat SSCEC		1.029	1.072	
3	Sertifikat SSSC			35	
4	Sertifikat P3K			982	
Total			15.715	16.817	107,01 %

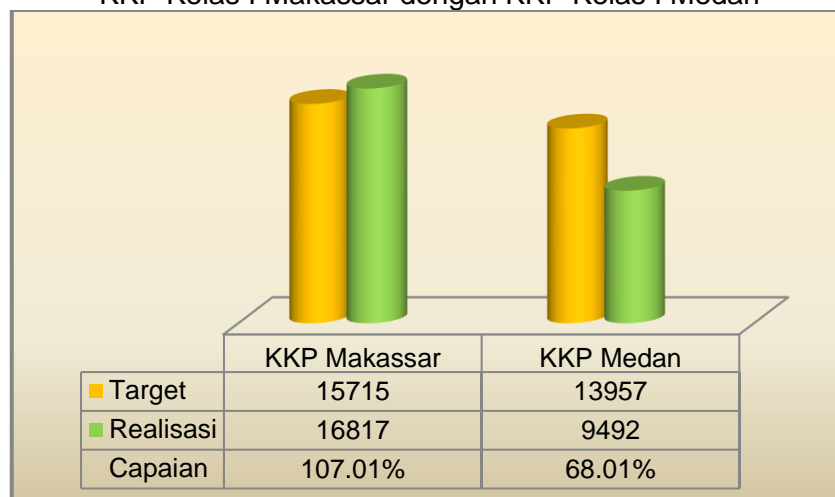
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase capaian indikator mencapai 107,01 %, kontribusi tertinggi berasal dari sertifikat PHQC dan kontribusi paling rendah pada sertifikat P3K. Capaian kinerja lebih tinggi bila dibandingkan dengan target RAP.

Grafik III.1 Perbandingan Capaian Indikator Ke-1 KKP Kelas Makassar tahun 2018 dan tahun 2019



Dari grafik III.1 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian untuk indikator jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan pada tahun 2018 dan tahun 2019 semuanya di atas target yang telah ditentukan.

Grafik III.2 Perbandingan Capaian Indikator Ke-1 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



Grafik III.2 tergambar bahwa untuk KKP Kelas I Makassar capaian indikator ke-1 melebihi dari target yaitu 107,01%, sedangkan

untuk KKP Kelas I Medan capaiannya tidak memenuhi target yang telah ditentukan hanya 68,01 %.

5) Analisis Keberhasilan Kegiatan

Terdapat beberapa hal yang memberikan kontribusi terhadap tercapainya target penerbitan sertifikat kekarantinaan kesehatan alat angkut yakni :

- a) Meningkatnya jumlah penumpang kapal menyebabkan frekwensi perjalanan kapal juga bertambah sehingga berpengaruh terhadap kondisi sanitasi kapal yang ditandai dengan terbitnya dokumen SSCEC.
- b) Adanya peningkatan pelayanan di Pelabuhan Makassar seperti :
 - (1) Beroperasinya Makassar New Port
 - (2) Penambahan container crane
 - (3) Sistem Pelayanan Satu Atap (Inaportnet)
- c) Adanya proyek strategis nasional (PLTB), Kereta api dan jalan tol layang yang membutuhkan baik tenaga kerja yang besar.

6) Masalah yang dihadapi

a) Eksternal

- (1) Terlambatnya informasi kedatangan dan keberangkatan kapal dari Agen Kapal;
- (2) Terlambatnya informasi tindakan penyehatan kapal.

b) Internal

Ketersediaan tenaga yang masih kurang sehingga menyebabkan adanya beban kerja yang berlebihan;

7) Usul pemecahan masalah

a) Eksternal

- (1) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait;
- (2) Menginformasikan mengenai SOP kedatangan dan keberangkatan kapal kepada pihak agen pelayaran;

(3) Menginformasikan mengenai SOP tindakan penyehatan alat angkut kepada agen pelayaran.

b) Internal

(1) Memberikan pelatihan teknis secara berkala.

(2) Menugaskan dan membekali tenaga dari bidang lain sesuai standar kekarantinaan kesehatan

8) Analisis Efisiensi Sumber daya

Penerapan aplikasi online dalam penerbitan dokumen kesehatan dapat mempersingkat waktu dalam penerbitan dan menyederhanakan alur birokrasi.

b. Realisasi Anggaran

Tabel III.3 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Pertama Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Evaluasi Simkespel	18.555.000	17.576.000	94,72
2	Konsultasi Sistem Pelaporan & Penerbitan Dokumen melalui Simkespel	13.576.000	13.465.458	99,19
3	Penerbitan Dokumen Simkespel	13.300.000	11.760.000	88,42
4	Sosialisasi Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah Kerja	299.768.000	299.327.172	99,85
5	Sosialisasi PP 64 Tahun 2019	12.270.000	12.270.000	100
6	Rapat Konsolidasi Internal Bidang UKLW	1.440.000	1.392.000	96,67
7	Konsultasi/ Koordinasi Peningkatan Pengawasan Faktor Risiko Penyakit	50.260.000	50.244.671	99,97
8	Konsultasi teknis dan manajemen Pengendalian Karantina dan SE	34.950.000	34.949.300	100
9	Pertemuan koordinasi program & penguatan jejaring kerja	32.080.000	28.960.484	90,28

10	Konsultasi Petugas wilker ke Induk	33.360.000	33.359.000	100
11	Koordinasi dengan lintas sektor terkait (koordinasi, integrasi, sinkronisasi program karkes dan kespel)	26.520.000	26.509.500	99,96
12	Konsultasi teknis terkait pelayanan vaksinasi bagi pelaku perjalanan internasional	32.050.000	28.988.049	90,45
13	Pertemuan Coffe Morning dengan LS/LP/jumat bersih	58.846.000	48.329.500	82,13
14	Pertemuan Penguatan Jejaring LS/LP dalam pengendalian FR Kesmas	40.355.000	31.457.000	77,95
15	Advokasi dan koordinasi pencegahan dan pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja	23.625.000	23.625.000	100
16	Rapat Koordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan dan Lintas Sektor	7.400.000	7.400.000	100
17	Koordinasi Program Kekeparantinaan	44.775.000	42.030.119	93,87
18	Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut	21.760.000	21.513.800	98,87
19	Pemeriksaan Kekeparantinaan Alat Angkut	2.400.000	0	0
20	Penyediaan Bahan Kesehatan	75.830.000	75.335.965	99,35
21	Penyediaan Bahan Pemeriksaan Habis Pakai	36.000.000	35.625.000	98,96
22	Pengadaan Bahan Kesehatan Laboratorium Kesehatan Lingkungan Haji	50.000.000	49.900.000	99,80
23	Layanan Pemeriksaan Kesehatan Alat Angkut Dalam Rangka Penerbitan SSCC/SSCEC (Ship Sanitation Control Certificate/ Ship Sanitation Control Exemption Certificate)	39.360.000	28.500.000	72,41
24	Layanan Kekeparantinaan Kesehatan di Bandar Udara	409.530.000	378.018.500	92,31
25	Layanan Kekeparantinaan Kesehatan Dalam	65.450.000	52.500.000	80,21

	Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)			
26	Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)	2.730.000	1.500.000	54,95
27	Layanan Pemeriksaan P3K Kapal	31.000.000	30.000.000	96,77
	Total	1.477.190.000	1.384.536.518	93,73%

Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 1.384.536.518,- (93,73 %).

2. INDIKATOR KEDUA

Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

Target persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP pada tahun 2019 adalah sebesar 100%.

a. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pengertian

Jumlah penerbitan notifikasi, rujukan suspek, verifikasi rumor / penyelidikan epidemiologi dan penanganan bencana.

2) Definisi Operasional

Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam dibandingkan dengan jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun

3) Rumus (cara perhitungan)

Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam dibandingkan dengan jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun

$$\frac{\text{Jumlah sinyal SKD KLB yang direspon kurang dari 24 jam}}{\text{Jumlah sinyal SKD KLB dalam periode satu tahun}} \times 100\%$$

4) Capaian Kinerja

$$\frac{88}{88} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2019 terdapat sinyal SKD KLB, KLB, dan Bencana yang direspon < 24 Jam yaitu 88 kasus/kejadian dan capaian sebesar 100%, sedangkan target RAP Ditjen P2P adalah 90 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.4 Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di wilayah layanan KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Jenis Sinyal	Jumlah Sinyal	Jmlah Yang direspon < 24 Jam	Capaian %	Ket
1	Hasil skrining suhu >38	55	55	100	Notifikasi
2	Rumor	12	12	100	Verifikasi Rumor / Penyelidikan Epidemiologi
3	Hasil skrining suspek	20	20	100	Rujukan Suspek
4	Informasi Kedatangan Pengungsi	1	1	100	Penanganan Bencana
Total		88	88	100	

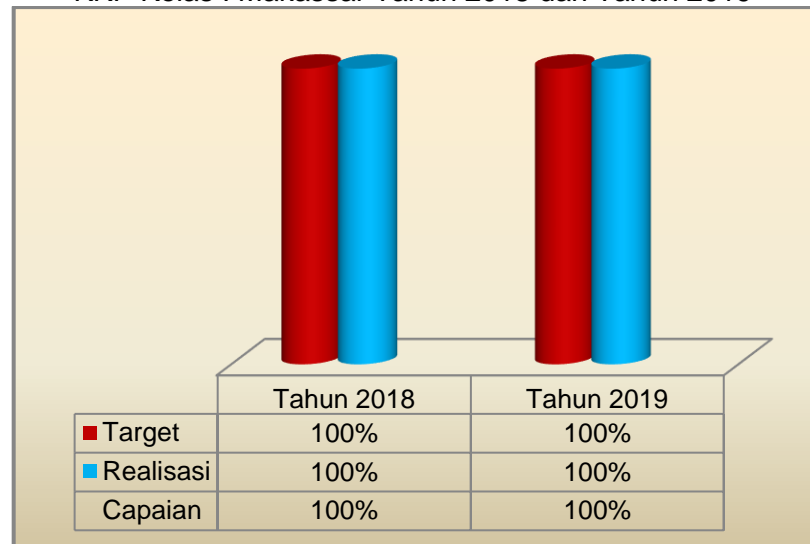
Sumber : data primer tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 4 jenis sinyal kewaspadaan. Jenis sinyal yang terbanyak adalah hasil screening melalui pemantauan thermal scanner terhadap pelaku perjalanan internasional dari daerah terjangkit (jamaah umrah dan haji) sebanyak 52 notifikasi Merscov dan 3 notifikasi malaria yang berasal dari Papua. Dan yang terendah adalah sinyal informasi kedatangan pengungsi yang terkait dengan kerusuhan di Wamena Papua sebanyak 1 kali.

Tabel III.5 Perbandingan RAP dengan RAK Indikator Kedua KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

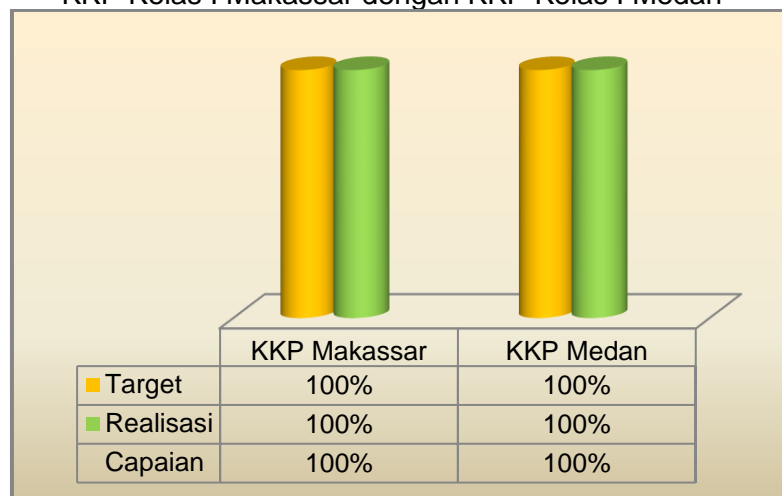
No	Jenis Sinyal	Target RAP	Target RAK	Jmlah Yang direspn < 24 Jam	Capaian %	Ket
1	Hasil skrining suhu >38	100 %	100 %	55	100	Notifikasi
2	Rumor			12	100	Verifikasi Rumor / Penyelidikan Epidemiologi
3	Hasil skrining suspek			20	100	Rujukan Suspek
4	Informasi Kedatangan Pengungsi			1	100	Penanganan Bencana
Total		100 %	100 %	88	100	

Grafik III.3 Perbandingan Capaian Indikator Ke-2 KKP Kelas I Makassar Tahun 2018 dan Tahun 2019



Grafik III.3 menggambarkan capaian untuk indikator ke-2 untuk tahun 2018 dan 2019 sebesar 100 %.

Grafik III.4 Perbandingan Capaian Indikator Ke-2
KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



Dari grafik III.4 di atas untuk KKP Kelas I Makassar dan KKP Kelas I Medan memperoleh capaian untuk indikator ke-2 sebesar 100 %.

- 5) Analisa Keberhasilan Kegiatan
 - a) Keberhasilan dari capaian target merupakan kerja bersama dari tim gerak cepat KKP- Provinsi – RSUP Wahidin dan *Distric Surveilans Officer* di setiap Kabupaten / Kota yang secara aktif membantu.
 - b) Pertemuan penguatan jejaring dengan lintas sektor dan lintas program terbukti sangat membantu dalam penyampaian informasi dan kewaspadaan dini menghadapi KLB atau Bencana.

- 6) Masalah yang dihadapi

Masih ada daerah/wilayah yang terlambat memberikan informasi balik terkait notifikasi yang diberikan.

7) Usul pemecahan masalah
 Lebih meningkatkan koordinasi dengan daerah atau wilayah.

8) Analisis Efisiensi Sumber daya
 Adanya *Whatsapp Group* yang telah dibuat yang beranggotakan petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, RSUP Wahidin Sudiro Husodo serta dari KKP Kelas I Makassar yang memudahkan dalam komunikasi dan koordinasi dan bertukar informasi walaupun masih ditemui beberapa masalah.

b. Realisasi Anggaran

Tabel III.6 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kedua Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Orientasi petugas KKP dalam Pengendalian Penyakit Menular Berbahaya di Pintu Masuk Negara	96.110.000	90.636.500	94,30 %
2	Pertemuan Community Based Surveillance di Wilayah Kerja	15.737.000	14.097.150	89,58 %
3	Verifikasi Rumor penyakit potensial KLB/Penyelidikan Epidemiologi/Penanganan Bencana di wilayah	59.580.000	56.162.500	94,26 %
Total		171.427.000	160.896.150	93,86%

Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 171.427.000,- (93,86 %).

3. INDIKATOR KETIGA

Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

Target jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit pada tahun 2019 adalah sebanyak 1.253 dokumen.

a. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pengertian

Pengamatan penyakit maupun faktor risiko penyakit di pintu masuk negara baik pelabuhan maupun bandara dan puskesmas wilayah buffer selama periode satu tahun.

- a) Sertifikat COP adalah sertifikat yang diberikan terhadap kapal yang datang dari luar negeri;
- b) Gendec adalah pernyataan kesehatan yang diberikan oleh Kapten penerbang yang datang dari luar negeri;
- c) Laporan Surveilans rutin adalah laporan rutin klinik wilker KKP yang melayani penumpang yaitu Wilker Bandara Hasanuddin, Wilker Pelabuhan Makassar, Wilker Pelabuhan Parepare, Wilker Pelabuhan Bajoe (52 minggu x 4 wilker yang memiliki klinik);
- d) Laporan Surveilans Puskesmas Buffer merupakan laporan bulanan puskesmas terdiri dari total 16 puskesmas x 12 bulan.

Tabel III.7 Distribusi Puskesmas Buffer Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Wilker KKP Kelas I Makassar	Puskesmas Buffer
1	Bandara Hasanuddin	Mandai
		Sudiang
		Sudiang Raya
2	Pelabuhan Makassar dan Pos Pelabuhan Rakyat Paotere	Pattinngaloang
		Andalas
		Tarakan
		Tabaringan
3	Biringkassi	Bowong Cindea
4	Awerange	Mangkoso Padongko
5	Parepare	Madising Na Mario
		Lappadde
6	Bajoe	Bajoe
7	Palopo	Pontap
8	Malili	Malili

2) Definisi Operasional

Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan dan di klinik layanan lainnya dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dalam periode satu tahun.

3) Rumus (cara perhitungan)

Akumulasi jumlah sertifikat COP, Gendec dan hasil pemeriksaan surveilans rutin di klinik layanan lainnya dalam satu tahun.

$$\frac{\text{Jumlah sertifikat COP, Gendec dan surveilans}}{\text{Jumlah target}} \times 100\%$$

4) Capaian Kinerja

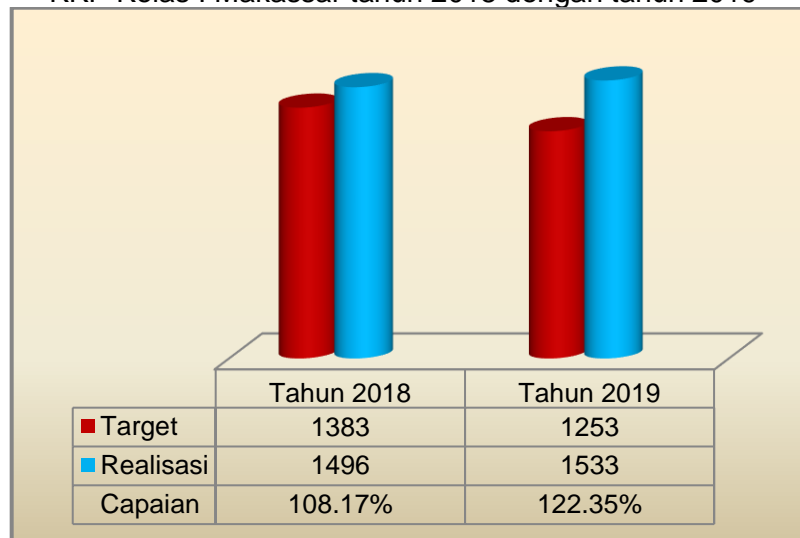
$$\frac{1.533}{1.253} \times 100\% = 122,35 \%$$

Capaian kinerja pada indikator ini secara rinci disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel III.8 Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Indikator Kedua Perjanjian Kinerja KKP Kelas IMakassar Tahun 2019

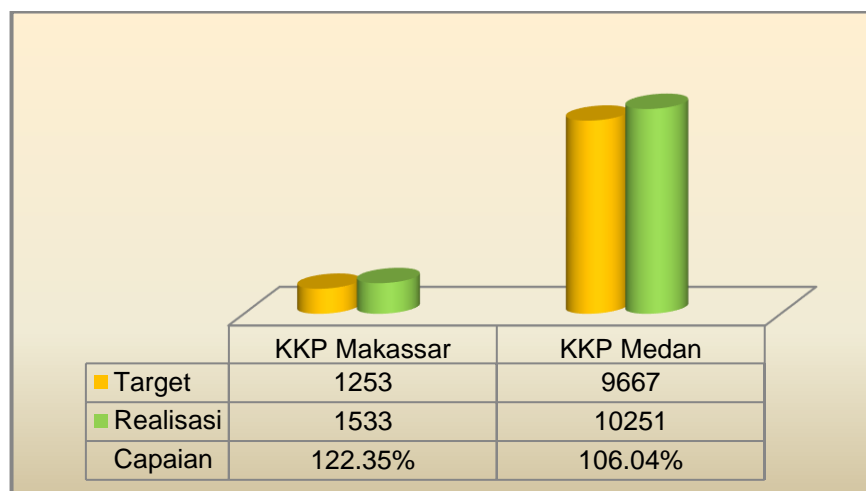
No	Item	Target RAK	Realisasi	Capaian	Target RAP
1	Sertifikat COP	230	303	131,74	100%
2	Gendec	623	830	133,23	
3	Surveilans Rutin	208	208	100	
4	Surveilans PKM Buffer	192	192	100	
Total		1.253	1.533	122,35	100%

Grafik III.5 Perbandingan Capaian Indikator ke-3 KKP Kelas I Makassar tahun 2018 dengan tahun 2019



Grafik III.5 menggambarkan capaian indikator ke-3 KKP Kelas I Makassar untuk tahun 2018 dan 2019 di atas target yaitu untuk tahun 2018 sebesar 108,17% dan 2019 sebesar 122,35%.

Grafik III.6 Perbandingan Capaian Indikator ke-3 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



5) Analisis Keberhasilan Kegiatan

Keberhasilan program/indikator ini tidak terlepas dari peran internal KKP maupun peran aktif lintas sektor dan lintas program di pelabuhan, bandara, maupun di wilayah buffer.

6) Masalah yang dihadapi

Masalah yang dihadapi diantaranya adalah pengumpulan data tidak tepat waktu, sehingga menghambat analisa data

7) Usul pemecahan masalah

Memudahkan system pelaporan dengan menggunakan media online dapat juga menggunakan website skdr.surveilans.org

8) Analisis Efisiensi Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan adalah memanfaatkan petugas surveilans puskesmas, maupun petugas surveilans KKP, sedangkan untuk wilker dengan jumlah personil yang terbatas ditunjuk petugas penanggung jawab PKSE.

b. Realisasi Anggaran

Tabel III.9 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Ketiga Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique)	27.500.000	22.350.000	81,27 %
Total		27.500.000	22.350.000	81,27%

Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 22.350.000,- (81,27 %).

Realisasi anggaran yang hanya 81,27% tidak sinergi dengan capaian kinerja yang melampaui target (122,35 %), hal ini disebabkan karena jumlah petugas untuk layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan COP sesuai standar SBK 3 (tiga) orang petugas untuk setiap kegiatan, namun di lapangan terdapat beberapa wilker KKP Kelas I Makassar yang hanya memiliki 2 (dua) atau bahkan 1 (orang) petugas untuk setiap kegiatan.

4. INDIKATOR KEEMPAT

Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

Target jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus pada tahun 2019 sebanyak 9 lokasi yakni :

1. Pelabuhan Makassar
2. Bandara Hasanuddin
3. Pelabuhan Paotere
4. Pelabuhan Awerange
5. Pelabuhan Garongkong
6. Pelabuhan Parepare
7. Pelabuhan Bajoe
8. Pelabuhan Bira
9. Asrama Haji Sudiang Makassar

a. Capaian Kinerja Organisasi

- 1) Pengertian

Jumlah lokasi posko pelayanan kesehatan pada situasi khusus.

2) Definisi Operasional

Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada saat situasi khusus tertentu seperti lebaran, natal, tahun baru dan lain-lain dalam periode satu tahun.

3) Rumus (cara perhitungan)

Akumulasi jumlah posko yang melakukan pelayanan kesehatan pada saat lebaran, natal, tahun baru dan lainnya dalam satu tahun.

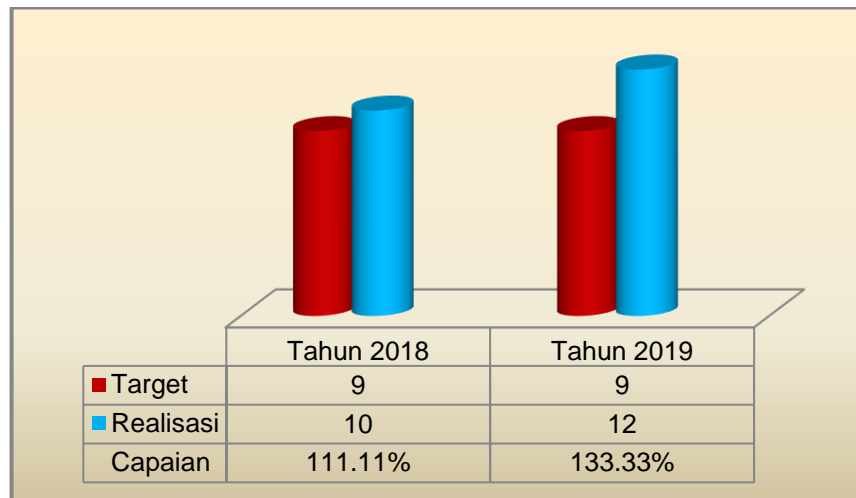
$$\frac{\text{Jumlah Lokasi Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus}}{\text{Jumlah target lokasi pelayanan kesehatan pada situasi khusus}} \times 100\%$$

4) Capaian Kinerja

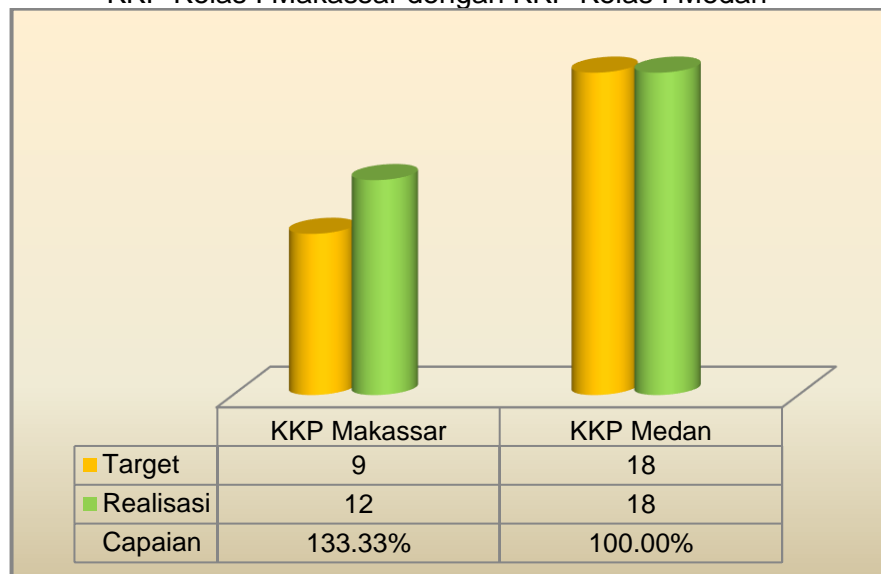
$$\frac{12}{9} \times 100 \% = 133,33 \%$$

Jumlah lokasi yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada situasi khusus sebanyak 12 lokasi (pelabuhan laut Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Paotere, Pelabuhan Awerange, Pelabuhan Garongkong, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Bajoe, Pelabuhan Bira, Bandara Tampa Padang, Asrama Haji Sudiang, Pelabuhan Simboro Mamuju dan Pangkalan Lanud TNI AU), pencapaian melebihi target yang telah ditetapkan sebanyak 11 lokasi sehingga pencapaian pada tahun 2019 adalah 133,33%. Pencapaian melebihi target dikarenakan adanya penambahan 3 lokasi posko yaitu Tampa Padang, Pelabuhan Simboro Mamuju dan Pangkalan Lanud TNI AU.

Grafik III.7 Perbandingan Capaian Indikator Ke-4
KKP Kelas I Makassar Tahun 2018 dengan Tahun 2019



Grafik III.8 Perbandingan Capaian Indikator Ke-4 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



5) Analisis Keberhasilan Kegiatan

- a) Wilayah pelabuhan/bandara udara yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada situasi khusus pada tahun 2019 sebanyak 12 lokasi atau tercapai 133,33%. Keberhasilan ini tercapai berkat kerjasama yang baik antar lintas sektor terkait yang meliputi Kantor Otoritas Bandara Wilayah V, PT. Angkasa Pura I (Persero), Maskapai Penerbangan, Imigrasi, RS. TNI AU dr. Dody Sarjoto, dan penyedia jasa lain di wilayah pelabuhan/bandara;
 - b) Posko yang didirikan di Pangkalan Lanud TNI AU diadakan untuk pengungsi dari Wamena, Papua;
 - c) Posko di Tampa Padang dan Pelabuhan Simboro terletak di Sulawesi Barat.
- 6) Masalah yang dihadapi
- a) Internal
Perlengkapan medis lapangan masih terbatas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di lapangan.
 - b) Eksternal
Masih terdapat beberapa lokasi pelayanan kesehatan yang memiliki ruangan yang tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pasien karena keterbatasan tempat pelayanan.
- 7) Usul pemecahan masalah
- a) Internal
Menyediakan perlengkapan medis lapangan yang memadai dalam menunjang terlaksananya pelayanan kesehatan pada situasi khusus.
 - b) Eksternal
Perlunya koordinasi dengan lintas sektor yang mengadakan posko terpadu untuk membuat tempat pelayanan kesehatan yang lebih memadai di lokasi posko.
- 8) Analisis Efisiensi Sumber Daya

- a) Salah satu penunjang keberhasilan terlaksananya pelaksanaan pelayanan kesehatan pada situasi khusus adalah dengan adanya pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh petugas KKP Kelas I Makassar seperti pelatihan BTCLS (*Basic Trauma and Cardiac Life Support*), pelatihan ATLS(*Advance Trauma Life Support*), Pelatihan *Flight Surgeon*, Pelatihan *Flight Nurse*, Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat) dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang diikuti oleh petugas KKP non medis dan Lintas Sektor terkait;
- b) Pelatihan KKM (Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat); dan Pelatihan Kegawatdaruratan yang diadakan oleh PT. Angkasa Pura I yang melibatkan lintas sektor terkait;
- c) Penyiapan posko terpadu yang telah disiapkan oleh pengelola pelabuhan/ bandara.

Tabel III.10 RAP, RAK dan Realisasi Indikator Keempat KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

RAP	RAK	Capaian (%)
100%	100%	133,33%

b. Realisasi Anggaran

Tabel III.11 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Keempat Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	71.225.000	70.720.000	99,29 %
2	Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji	908.109.000	903.534.900	99,50 %
3	Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji	351.300.000	348.013.690	99,06 %
Total		1.330.634.000	1.322.268.590	99,37 %

Anggaran jumlah pelayanan kesehata pada situasi khusus adalah sebesar Rp. 1.330.634.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.322.268.590,- atau 99,37 %.

5. INDIKATOR KELIMA

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

Target jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah pada tahun 2019 adalah sebanyak 4 (empat) lokasi yakni :

1. Pelabuhan Bajoe (Reviu Renkon)
2. Bandara Hasanuddin (Reviu Renkon)
3. Pelabuhan Belang Belang (Penyusunan Renkon)
4. Pelabuhan Palopo (Penyusunan Renkon)

a. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pengertian

Jumlah Pelabuhan/Bandara di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yang baru memiliki dokumen rencana kontijensi.

2) Definisi Operasional

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.

3) Rumus (cara perhitungan)

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.

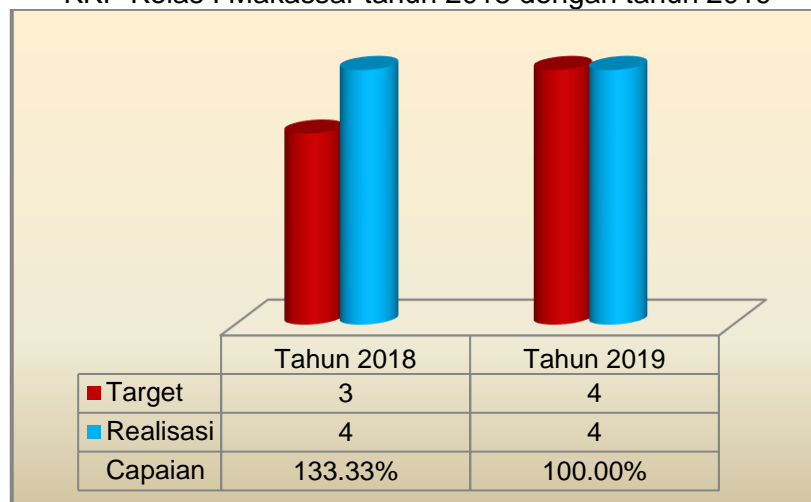
$$\frac{\text{Jumlah Pelabuhan/Bandara yang memiliki dokumen rencana kontijensi}}{\text{Jumlah target Pelabuhan/Bandara yang memiliki dokumen rencana kontijensi}} \times 100\%$$

4) Capaian Kinerja

$$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

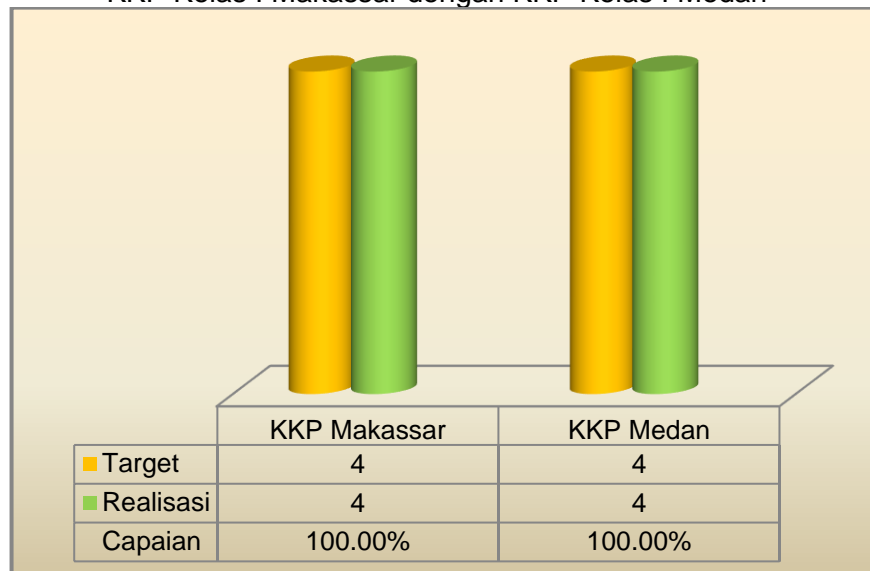
Pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) wilayah kerja yang memiliki dokumen renkon yakni Pelabuhan Palopo dan Pelabuhan Belang-Belang dan 2 wilker yang melaksanakan rewiu renkon yakni Bandara Hasanuddin dan Pelabuhan Bajoe, sehingga pencapaian target mencapai 100 %. Target nasional dalam RAP ditjen P2P sebesar 100% maka target RAP tercapai. Secara kumulatif jumlah Bandara dan Pelabuhan yang telah memiliki Dokumen Rencana Kontinjensi sebanyak 6 Lokasi

Grafik III.9 Perbandingan Capaian Indikator Ke-5 KKP Kelas I Makassar tahun 2018 dengan tahun 2019



Grafik III.9 terlihat bahwa tahun 2018 capaian indikator ke-5 melebihi target yang telah ditentukan karena bertambahnya kegiatan penyusunan rencana kontijensi dan simulasi di lingkup Pelabuhan Makassar.

Grafik III.10 Perbandingan Capaian Indikator Ke-5 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



5) Analisis Keberhasilan Kegiatan

- a) Keberhasilan kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran karena dibutuhkan peran aktif dari lintas sector dalam menyusun dokumen rencana kontijensi.
- b) Koordinasi dan komunikasi antar Lintas Sektor (LS) di Pelabuhan/Bandara dan di wilayah dalam pelaksanaan kegiatan tupoksi KKP yang telah terjalin mempermudah dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi KKM di Pelabuhan/Bandara.

6) Masalah yang dihadapi

- a) Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua pelabuhan/bandara dapat melaksanakan penyusunan Dokumen Renkon KKM;
- b) Pemahaman LS terkait Dokumen Renkon sebagai milik bersama yang masih perlu selalu disosialisasikan agar LS terkait merasa perlu mengenai adanya Dokumen Renkon KKM di Pelabuhan/Bandara;

- c) Kemampuan petugas wilker dalam memaparkan/menjelaskan pentingnya KKM di pelabuhan belum merata.
- 7) Usul pemecahan masalah
- a) Penguatan kapasitas petugas wilker dalam memaparkan/menjelaskan pentingnya Renkon KKM di Pelabuhan dan Bandara;
- b) Sosialisasi terhadap lintas sektor dilingkup pelabuhan/ bandara yang belum memiliki dokumen renkon KKM.
- 8) Analisis Efisiensi Sumber Daya
- Koordinasi dengan LS terkait yang baik dan intens khususnya dalam pelaksanaan kegiatan termasuk dalam penyusunan dokumen renkon setiap acara *coffee morning* diharapkan dapat memberikan pemahaman awal terhadap lintas sektor sehingga pada saat penyusunan dokumen renkon KKM mereka sudah mengetahui pentingnya Dokumen Renkon KKM di pelabuhan/ bandara.

b. Realisasi Anggaran

Tabel III.12 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kelima Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM di Pel Palopo dan Pel Belang belang	84.440.000	83.160.000	98,48 %
2	Reviu Renkon di Bandara Hasanuddin	44.839.000	44.195.000	98,56 %
3	Reviu Renkon di Pelabuhan Bajoe Bone	45.660.000	43.984.000	96,33 %
Total		174.939.000	171.339.000	97,94 %

Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 171.339.000,- (97,94 %).

6. INDIKATOR KEENAM

Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

Target jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 41.630 sertifikat.

a. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pengertian

Jumlah sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat izin angkut jenazah, jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam satu tahun.

2) Definisi Operasional

Jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan permintaan/permohonan yang diterima dalam periode satu tahun.

3) Rumus (cara perhitungan)

Akumulasi jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan permintaan/permohonan yang diterima dalam periode satu tahun.

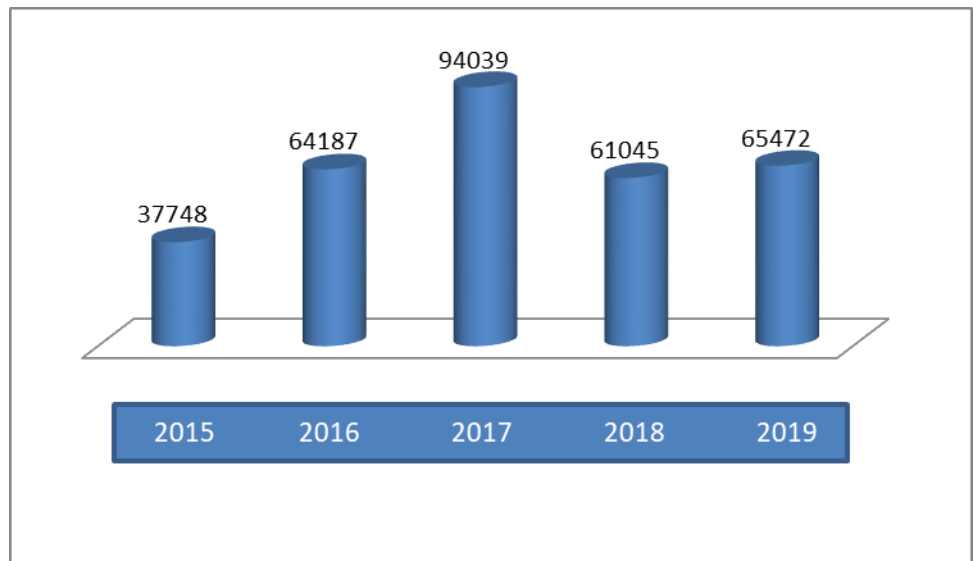
$$\frac{\text{Jumlah sertifikat atau surat ijin layanan kesehatan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target sertifikat atau surat ijin layanan kesehatan yang diterbitkan}} \times 100 \%$$

4) Capaian Kinerja

$$\frac{65.472}{41.630} \times 100 \% = 157,27 \%$$

Jumlah sertifikat atau surat keterangan kesehatan yang diterbitkan pada tahun 2019 sebanyak 65.472 atau 157,27 %.

Grafik III.11 Perbandingan Sertifikat atau Surat keterangan Kesehatan KKP Kelas I Makassar dari tahun 2015-2019

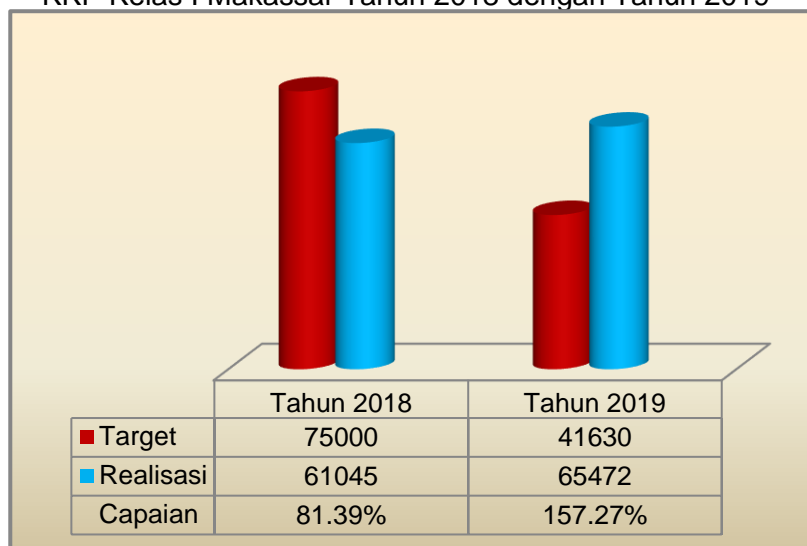


Berdasarkan grafik di atas terjadi peningkatan jumlah sertifikat atau surat keterangan kesehatan dari 61.045 (tahun 2018) menjadi 65.472 (tahun 2019), yang sebagian besar berasal dari jumlah penerbitan/legalisasi ICV.

Tabel III.13 Jumlah sertifikat/surat keterangan kesehatan KKP Kelas I Makassar tahun 2019

No.	Sertifikat/ Surat Keterangan Kesehatan	Jumlah
1	SKLT	6.735
2	Izin Angkut Orang Sakit	85
3	Izin Angkut Jenazah	701
4	Izin Masuk Jenazah	0
5	Penerbitan ICV KKP	38.793
6	Legalisasi ICV KKP	508
7	Pengambilan ICV Klinik / RS	18.650
	- Klinik Azka Nadhifah	6.100
	- Klinik TelkoMedika	3.050
	- Klinik Kimia Farma	3.800
	- RSIA Ananda	1.250
	- RSIA Kartini	1.800
	- RS. Bhayangkara	1.300
	- Klinik Inggit	1.150
	- Klinik Lacasino	200
Total		65.472

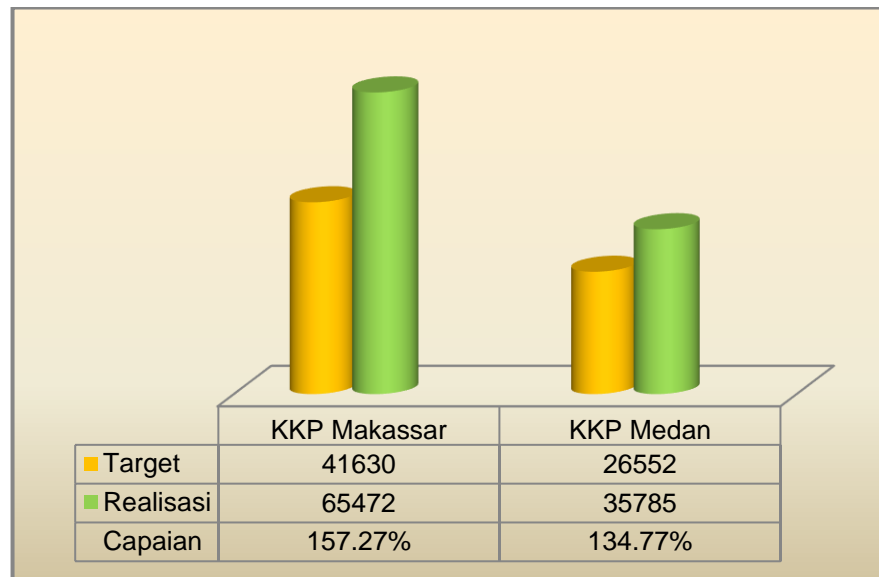
Grafik III.12 Perbandingan Capaian Indikator Ke-6
KKP Kelas I Makassar Tahun 2018 dengan Tahun 2019



Grafik III.12 menggambar bahwa untuk tahun 2018 indikator ke-6 tidak tercapai disebabkan jumlah legalisasi dan penerbitan ICV pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada awal tahun 2018 terjadi masalah pada salah satu biro travel perjalanan umroh, dimana biro travel tersebut merupakan biro travel dengan jumlah jamaah umroh paling banyak. Biro travel perjalanan tersebut tidak dapat memberangkatkan jamaahnya sesuai jadwal yang pada akhirnya berakibat pada pencabutan izin operasionalnya.

Kondisi ini menyebabkan berkurangnya permohonan pelayanan vaksinasi meningitis di KKP Kelas I Makassar dengan jumlah yang sangat signifikan. Kondisi ini berlangsung sampai akhir tahun dan berdampak pada tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2019 penyesuaian target disesuaikan dengan kondisi dan tren yang ada, sehingga pencapaian dapat melebihi target yaitu sebesar 157,27%.

Grafik III.13 Perbandingan Capaian Indikator Ke-6
KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



5) Analisis Keberhasilan Kegiatan

- a) Jumlah sertifikat/surat keterangan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan pada tahun 2019 sebanyak 65.472 sertifikat atau 157,27 %. Ada beberapa jenis sertikat yang masuk dalam indikator tersebut yaitu : Sertifikat laik terbang, izin angkut orang sakit, izin angkut jenazah dan jumlah penerbitan/legalisasi ICV. Keberhasilan ini tercapai karena masih tingginya jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan umroh, hal ini berbanding lurus dengan jumlah penerbitan dokumen ICV yang menjadi salah satu syarat untuk penerbitan visa umroh;
- b) Terdapat peningkatan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional, hal ini terjadi akibat dibukanya pelayanan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional oleh klinik dan Rumah Sakit pada tahun 2019, pelayanan tersebut memudahkan akses bagi masyarakat.

6) Masalah yang dihadapi

- a) Internal

- (1) Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa petugas yang masih belum mengikuti pelatihan vaksinasi;
- (2) Terbatasnya sumber daya manusia di wilayah kerja yang melaksanakan pelayanan penerbitan/legalisasi ICV.

b) Eksternal

- (1) Minat Masyarakat Muslim Indonesia khususnya wilayah Sulawesi Selatan dan Barat untuk melaksanakan ibadah umroh terus mengalami peningkatan tetapi pengetahuan beberapa masyarakat masih kurang terkait prosedur yang harus dijalani untuk mendapatkan ICV dan manfaat vaksinasi Meningitis meningokokus;
- (2) Proses pelayanan vaksinasi meningitis sudah dapat dilakukan di Klinik dan RS namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti kesalahan penginputan/laporan dokumen ICV kedalam aplikasi Sinkarkes.

7) Usul pemecahan masalah

a) Internal

- (1) Mengikuti pelatihan vaksinasi bagi petugas pemberi layanan vaksinasi internasional di KKP Kelas I Makassar;
- (2) Menambah sumber daya manusia di Wilayah Kerja.

b) Eksternal

- (1) Layanan Vaksinasi Meningitis telah dilaksanakan di Klinik dan Rumah Sakit yang telah diverifikasi oleh KKP Kelas I Makassar yang memudahkan masyarakat untuk melakukan Vaksinasi Meningitis untuk mendapatkan dokumen ICV;
- (2) Perlunya diadakan sosialisasi manfaat vaksinasi Meningitis meningokokus terutama bagi pelaku perjalanan internasional, sosialisasi ini dapat dilaksanakan secara langsung maupun menggunakan media cetak dan elektronik;

(3) Perlu diadakan sosialisasi kepada Klinik atau RS tentang tata cara penginputan dan pelaporan dokumen ICV kedalam Aplikasi Sinkarkes.

8) Analisis Efisiensi Sumber Daya

- a) Jumlah sertifikat/surat keterangan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan pada tahun 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terlaksana karena telah meningkatnya kesadaran masyarakat akan status kesehatannya dan lintas sektor terkait dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang dokumen yang wajib dimiliki oleh pelaku perjalanan internasional yang akan keluar/ dalam negeri;
- b) Adanya pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh petugas seperti pelatihan *Vaccinologi Training*, pelatihan petugas vaksinasi dalam rangka penerbitan sertifikat vaksinasi internasional;
- c) Dibukanya pelayanan vaksinasi dan penerbitan dokumen ICV di Klinik dan RS, maka mendekatkan pelayanan kepada pelaku perjalanan internasional sehingga mengakibatkan pelayanan vaksinasi dan penerbitan dokumen ICV banyak dilaksanakan oleh klinik dan RS.

Tabel III.14 RAP, RAK dan Realisasi Kinerja Indikator Keenam KKP Kelas I Makassar tahun 2019

RAP	RAK	Capaian (%)
100%	100%	157,27%

b. Realisasi Anggaran

Tabel III.15 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Keenam Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
----	----------	----------	-----------	---------

1	Pengawasan faktor risiko kesehatan pra embarkasi haji bagi pelaku perjalanan internasional	83.000.000	82.887.300	99,86 %
2	Pengawasan faktor risiko kesehatan pasca debarkasi haji	21.340.000	20.124.900	94,31 %
3	Pelaksanaan pelayanan pengawasanPHEIC 24 Jam sehari dan 7 Hari seminggu	240.000.000	192.600.000	80,25 %
Total		344.340.000	295.612.200	85,85 %

Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 295.612.200,- (85,85 %).

Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 157,27 %, namun realisasi anggaran hanya 85,85 %. Hal ini diakibatkan karena sumber pendanaan pelaksanaan pelayanan pengawasanPHEIC 24 Jam sehari dan 7 Hari seminggu bersumber dari dana PNBPN, sedangkan untuk tahun 2019 KKP Kelas I Makassar tidak mencapai target untuk dana PNBPN, sehingga kegiatan pengawasan PHEIC menggunakan alokasi anggaran dari kegiatan lembur.

7. INDIKATOR KETUJUH

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

Target Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi pada tahun 2019 adalah sebanyak 7 lokasi yakni :

1. Pelabuhan Makassar
2. Pelabuhan Bajoe
3. Pelabuhan Parepare
4. Bandara Hasanuddin
5. Pelabuhan Palopo
6. Pelabuhan Awerange
7. Pelabuhan Malili

a. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pengertian

Pelabuhan/ bandara yang memiliki kondisi fisik lingkungan yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

2) Definisi Operasional

Jumlah pelabuhan/ bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan

Kriteria Objektif : pelabuhan dan bandara dinyatakan memenuhi syarat apabila $\geq 80\%$ memenuhi syarat dari hasil pemeriksaan TPM, TTU dan tempat penyediaan air bersih.

3) Rumus (cara perhitungan)

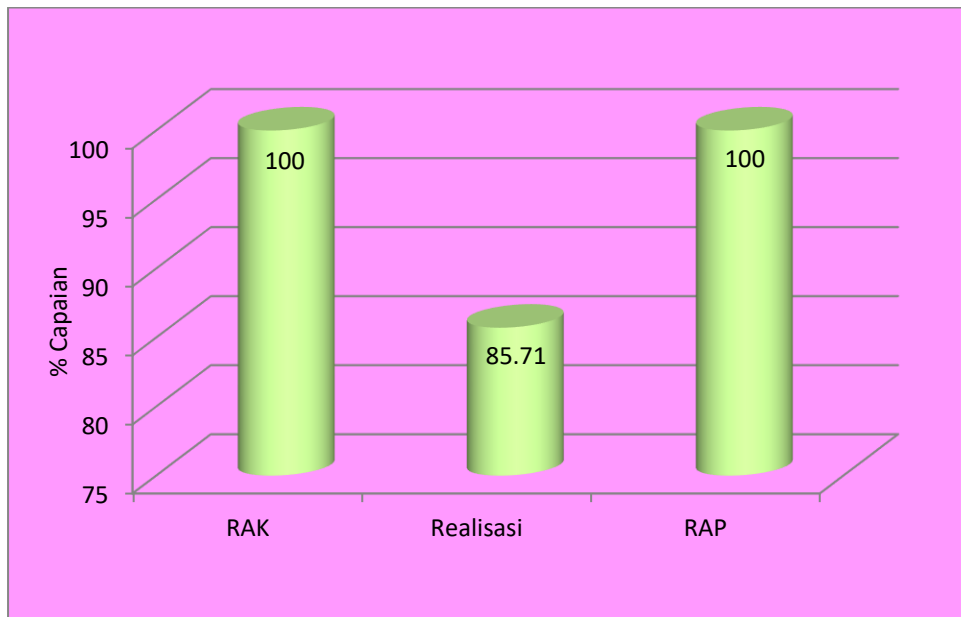
Akumulasi jumlah pelabuhan/ bandara/PLBD yang mempunyai TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan

$$\frac{\text{Jumlah pelabuhan dan bandara yang memenuhi syarat sanitasi}}{\text{Target pelabuhan dan bandara yang memenuhi syarat sanitasi}} \times 100\%$$

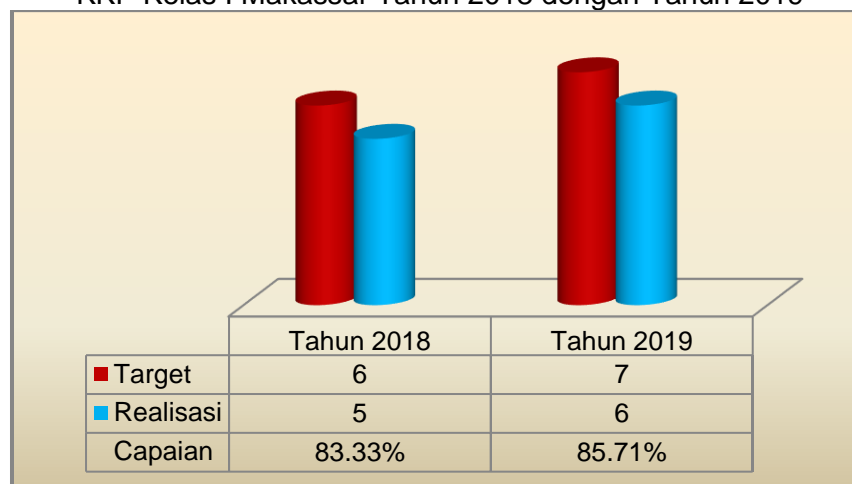
4) Capaian Kinerja

$$\frac{6}{7} \times 100\% = 85,71 \%$$

Grafik III.14 Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Jumlah Pelabuhan dan Bandara yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

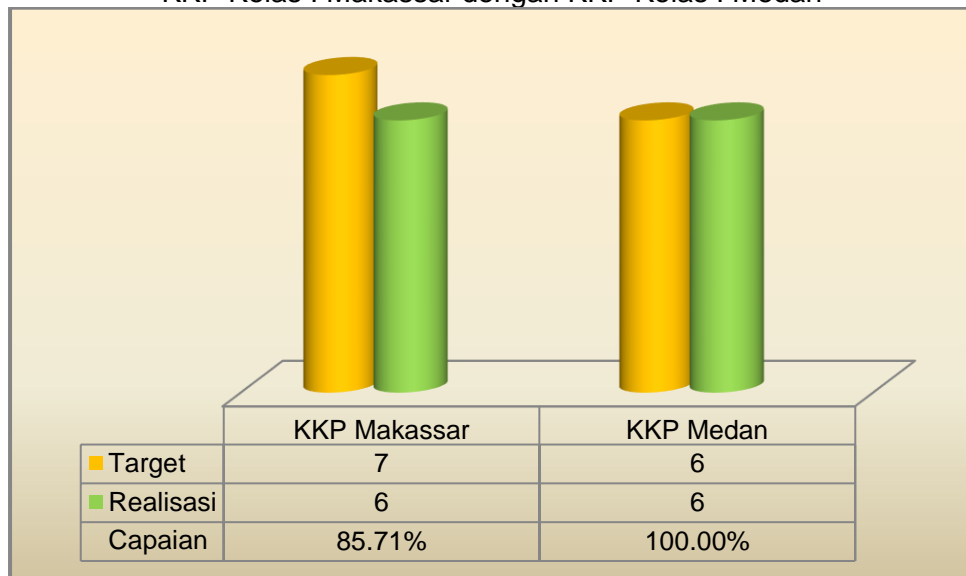


Grafik III.15 Perbandingan Capaian Indikator Ke-7 KKP Kelas I Makassar Tahun 2018 dengan Tahun 2019



Dari grafik III.15 terlihat bahwa untuk tahun 2018 dan 2019 capaian untuk indikator ini tidak tercapai, hal ini disebabkan karena Pelabuhan Makassar yang dijadikan sebagai target indikator tidak memenuhi syarat-syarat sanitasi.

Grafik III.16 Perbandingan Capaian Indikator Ke-7 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



Tabel III.16 Distribusi Hasil Pemeriksaan TPM di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

Wilayah Kerja		Bulan												% yang memenuhi syarat
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pelabuhan Makassar	MS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	15,69
	TMS	8	8	13	13	18	13	18	6	10	6	10	6	
Bandara Internasional Hasanuddin	MS	18	15	19	15	17	21	46	21	17	18	18	18	97,20
	TMS	0	0	1	0	0	1	2	0	1	1	0	1	
Pelabuhan Awerange	MS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100

	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pelabuhan Parepare	MS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100
	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pelabuhan Palopo	MS	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100
	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pelabuhan Bajoe	MS	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	94,44
	TMS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pelabuhan Malili	MS	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	100
	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Berdasarkan tabel di atas bahwa 7 (tujuh) wilayah kerja menjadi target memiliki TPM memenuhi syarat mencapai 80% kecuali pada Pelabuhan Makassar yang hanya mencapai 15,69%. Sehingga dalam hal ini hanya 6 (enam) wilayah kerja telah mencapai target.

Tabel III.17 Distribusi Hasil Pemeriksaan Tempat Penyediaan Air Bersih di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

Wilayah Kerja		Bulan												% yang memenuhi syarat
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pelabuhan Makassar	MS	3	3	3	0	2	0	0	0	3	5	5	2	63,41
	TMS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	7	0	
Bandara Internasional Hasanuddin	MS	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	100
	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pelabuhan Awerange	MS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100
	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pelabuhan Parepare	MS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100
	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pelabuhan Palopo	MS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pelabuhan Bajoe	MS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pelabuhan Malili	MS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Berdasarkan tabel di atas bahwa 7 (tujuh) wilayah kerja menjadi target memiliki tempat penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan mencapai 80% kecuali pada Pelabuhan Makassar yang hanya mencapai 63,41%. Sehingga dalam hal ini hanya 6 (enam) wilayah kerja telah mencapai target.

Tabel III.18 Distribusi Hasil Pemeriksaan Tempat Tempat Umum di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

Wilayah Kerja		Bulan												% dengan kriteria baik
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pelabuhan Makassar	MS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100
	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bandara Internasional Hasanuddin	MS	1	15	0	2	0	1	34	4	3	2	3	2	100
	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pelabuhan Awerange	MS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100
	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pelabuhan Parepare	MS	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	100
	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pelabuhan Palopo	MS	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	100
	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pelabuhan Bajoe	MS	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	100
	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pelabuhan Malili	MS	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	100
	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Berdasarkan tabel di atas bahwa pelabuhan dan bandara yang memiliki tempat-tempat umum yang memenuhi kriteria mencapai 80% telah tercapai pada 7 (tujuh) wilayah kerja yang menjadi target capaian (100%).

Tabel III.19 Jumlah Pelabuhan dan Bandara Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

Wilayah Kerja	Indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi			≥80% memenuhi syarat
	TPM	Tempat PAB	TTU	
Pelabuhan Makassar	15,69	48,22	100	TIDAK
Bandara Internasional Hasanuddin	97,20	100	100	YA
Pelabuhan Awerange	100	100	100	YA
Pelabuhan Parepare	100	100	100	YA
Pelabuhan Palopo	100	100	100	YA
Pelabuhan Bajoe	94,44	100	100	YA
Pelabuhan Malili	100	100	100	YA

Berdasarkan tabel di atas bahwa akumulasi nilai dari hasil pemeriksaan faktor lingkungan fisik dapat dilihat bahwa pelabuhan dan bandara yang memenuhi syarat-syarat sanitasi berdasarkan kriteria objektif yang ditentukan yaitu 6 (enam) dari 7 (tujuh) pelabuhan/bandara yang menjadi target (85,71%). Capaian pada indikator ini belum mencapai target yang telah ditentukan.

- 5) Analisis Kegagalan Kegiatan
 - a) Jumlah pelabuhan dan bandara yang memenuhi syarat sanitasi belum mencapai target yang telah ditentukan. Dari 7 (tujuh) lokasi target, 6 (enam) lokasi yang mencapai target sedangkan

1 lokasi belum mencapai target yaitu lokasi di Pelabuhan Makassar. Parameter yang tidak mencapai target tersebut adalah parameter Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dan parameter Penyediaan Air Bersih (PAB). Pengawasan sanitasi dilakukan secara rutin maupun berkala terhadap faktor fisik lingkungan yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit. Pengawasan dilakukan berupa pemeriksaan, pemberian saran perbaikan, kunjungan kembali, rekomendasi pihak terkait serta laporan. Pengawasan TPM dilaksanakan minimal sekali dalam 2 (dua) bulan, pengawasan tempat penyediaan air bersih dilakukan pada setiap bulan dan/atau jika ditemukan adanya indikasi pencemaran terhadap sarana air bersih. Pengawasan tempat PAB dilakukan berupa inspeksi dan pengambilan serta pengujian sampel air. Pengawasan TTU dilakukan berupa inspeksi terhadap fisik bangunan yang berpotensi terjadinya penularan penyakit.

- b) Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat untuk TPM ditindak lanjuti dengan bersurat ke Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dan GM PT. Pelindo IV (Persero) Cab. Makassar tentang hasil pengawasan faktor risiko kesehatan serta memberikan rekomendasi untuk : melakukan tindakan pemusnahan terhadap makanan/minuman kadaluarsa yang telah ditarik; pembinaan secara berkala terhadap tenat pada kawasan kuliner agar tidak menjual makanan/minuman yang sudah kadaluarsa; serta senantiasa memperhatikan kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya.
- c) Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat untuk PAB ditindak lanjuti dengan bersurat GM PT. Pelindo IV (Persero) Cab. Makassar tentang hasil uji lab. Sampel Air Bersih serta memberikan rekomendasi berupa : menjaga kebersihan lingkungan sekitar bak penampungan air; menguras bak penampungan air dan klorinasi secara berkala; serta air bersih yang dimasukkan pada bak penampungan utamanya air bersih

yang bersumber dari sumur bor untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut.

- d) PT. Pelindo (Persero) IV Cabang Makassar sebagai penyedia fasilitas menyatakan bahwa konsep pembangunan terminal merupakan area makanan jajanan/warung diperuntukkan hanya untuk menjual makanan jadi dan makanan kemasan serta tidak dipergunakan sebagai tempat pengolahan/memproduksi makanan. Fasilitas sanitasi yang disediakan berupa toilet umum yang hanya beroperasi ketika ada kapal penumpang. Keberadaan pedagang di terminal sebagian besar mengalihfungsikan kios sebagai TPM. Kondisi TPM yang tidak memenuhi syarat disebabkan kondisi fisik bangunan yang tidak memungkinkan sebagai TPM dan tidak tersedianya sumber air bersih, wastafel serta saluran pembuangan air limbah. Aktivitas TPM yang tidak dilengkapi dengan fasilitas sanitasi akan menjadi masalah terhadap kesehatan lingkungan. Produksi sampah dan buangan limbah cair dari hasil aktivitas dapur akan menjadi sumber datangnya vektor dan binatang pembawa penyakit sebagai *vehicle*/transpor penyakit dari lingkungan ke manusia.
- e) Kondisi tersebut akan selalu menjadi masalah kesehatan masyarakat selama bangunan terminal tidak dikembalikan ke fungsi semula.

6) Masalah yang dihadapi

Pencapaian pelabuhan dan bandara sehat memerlukan perhatian seutuhnya oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Rekomendasi dari hasil pemeriksaan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dilakukan perbaikan dengan beberapa hal :

- a) Perbaikan infrastruktur dibutuhkan ketersediaan anggaran dan membutuhkan waktu yang lama;
- b) Penggunaan kios tidak sesuai dengan fungsinya;

- c) *Feedback* pihak terkait dari rekomendasi yang telah disampaikan kurang maksimal;
 - d) Jumlah SDM sanitarian yang ada di wilayah kerja masih kurang;
 - e) Kesadaran masyarakat tentang pelabuhan/bandara sehat perlu ditingkatkan.
- 7) Usul pemecahan masalah
- a) Diharapkan untuk sementara tidak ada kegiatan operasional sebelum dilakukan perbaikan infrastruktur;
 - b) Mengembalikan kios ke fungsi semula sebagai tempat penjualan makanan jadi;
 - c) Menginisiasi pertemuan lintas sektor terkait, membahas tentang permasalahan fungsi kios;
 - d) Penambahan jumlah SDM sanitasi di wilayah kerja;
 - e) Mengoptimalkan peran forum pelabuhan sehat;
 - f) Pemberian edukasi kepada masyarakat pelabuhan/bandara tentang faktor risiko terjadinya penularan penyakit berbasis lingkungan untuk mencapai pelabuhan dan bandara sehat.
- 8) Analisis Efisiensi Sumber Daya
- a) Penggunaan anggaran dioptimalkan pada pembelian bahan dan kelengkapan pengawasan;
 - b) Peningkatan kompetensi bagi Petugas sanitasi di wilker masih kurang sehingga pengawasan belum optimal;
 - c) Ketersediaan SDM yang jumlahnya terbatas sehingga satu petugas melaksanakan lebih dari satu kegiatan. Kegiatan dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan yang lainnya.

b. Realisasi Anggaran

Tabel III.20 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Ketujuh Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
----	----------	----------	-----------	---

1	Pelaksanaan Pra Embarkasi	7.050.000	6.600.000	93,62 %
2	Pengawasan sanitasi bangunan/gedung/perkantoran/ industri/TTU/TPM	22.950.000	22.555.650	98,28 %
3	Pengambilan, Pemeriksaan dan Rujukan Sampel Lingkungan	140.605.000	134.340.000	95,54 %
4	Pemusnahan Limbah Medis	38.050.000	34.426.000	90,48 %
5	Pengawasan faktor risiko dalam rangka arus mudik	7.400.000	7.338.320	99,84 %
6	Kursus Penjamah Makanan	34.410.000	32.760.000	95,20 %
7	Penyuluhan Hygiene Sanitasi Makanan Bagi Pengolah Makanan Jajanan/Warung	18.068.000	18.042.600	99,86 %
Total		268.533.000	256.112.570	95,37 %

Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 256.112.570,- (95,37 %).

8. INDIKATOR KEDELAPAN

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

Target jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area pada tahun 2019 adalah sebanyak 7 lokasi yakni :

1. Pelabuhan Makassar
2. Pelabuhan Bajoe
3. Pelabuhan Parepare
4. Bandara Hasanuddin
5. Pelabuhan Palopo
6. Pelabuhan Awerange
7. Pelabuhan Malili

a. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pengertian

Pelabuhan dan Bandara yang dilakukan pengamatan dan pengendalian untuk mencapai wilayah yang bebas dari vektor dan binatang penular penyakit.

2) Definisi Operasional

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6

Kriteria Objektif : pelabuhan dan bandara dinyatakan bebas vektor apabila $\geq 83\%$ rata-rata selama setahun dari keenam parameter hasil pengukurannya memenuhi syarat.

3) Rumus (cara perhitungan)

Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva

anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6 dalam satu tahun

$$\frac{\text{Jumlah wilker yang bebas vektor}}{\text{Jumlah target wilker bebas vektor}} \times 100 \%$$

4) Capaian Kinerja

$$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

a) Bandara Hasanuddin

Tabel III.21 Nilai Indeks di Wilayah Kerja Bandara Hasanuddin KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

Wilayah Kerja	Indikator	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Bandara Hasanuddin	Nilai Indeks pinjal ≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,5	0
	HI Perimeter = 0	0	2,9	0	3,1	3	3	0	2,7	0	4,2	4,3	3
	HI Buffer < 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tidak ditemukan Larva Anopheles	0	0,26	0,12	0,17	0,26	0,12	0,15	0,05	0,075	0	0,1	0
	Kepadatan kecoa rendah	2	5	7	14	11	14	9	9	132	5	4	13
	kepadatan lalat < 6	10	5	2	6	2	6	7	5	16	21	15	11

Berdasarkan Tabel III.21 Pada bulan November di Bandara Hasanuddin ditemukan nilai indeks pinjal ≥ 1 Jika dihitung proporsi selama 12 kali pengamatan maka rata-rata sepanjang tahun indeks pinjal ≤ 1 . Keberadaan tikus di bandara dominan ditemukan di STP-AP Bandara dan area cargo Bandara. Banyaknya tumpukan sampah di area STP-AP bandara menjadi tempat yang disukai tikus untuk mencari sisa-sisa makanan, selain itu keberadaan tikus juga ditemukan pada area cargo banyaknya sumber makanan pada area tersebut menjadi tempat yang disukai oleh tikus untuk mencari makan. Tingginya indeks pinjal pada bulan November juga dipengaruhi oleh iklim dimana pada bulan November sudah memasuki

musim hujan dimana kelembaban lebih tinggi seperti yang kita ketahui bahwa pinjal merupakan parasit temporal yaitu berada dalam tubuh hospes saat membutuhkan makan. Pinjal yang tidak mendapatkan makanan tidak dapat hidup dalam lingkungan kering, tetapi pada lingkungan lembab maka pinjal dapat hidup berbulan-bulan. Untuk HI perimeter ditemukan angka HI diatas 0 pada beberapa bulan yakni pada bulan februari, april, mei, juni, agustus, oktober dan nopember. Rata-rata jentik ditemukan pada tempat penampungan dispenser. Penampungan dispenser merupakan container yang paling jarang dibersihkan oleh pemilik dan tanpa disadari tempat tersebut menjadi container perindukan dari jentik *Aedes aegypti*. pada perimeter area masih ditemukan keberadaan larva *Anopheles sp* hal ini dipengaruhi oleh masih banyaknya habitat-habitat yang berpotensi sebagai habitat larva *Anopheles sp*. jumlah habitat yang dimaksud rata-rata habitat sementara yang terdiri dari genangan air dan sawah. Untuk kepadatan kecoa juga bervariasi hal ini dipengaruhi oleh masih adanya TPM (tempat pengolahan makanan) yang masih belum memenuhi syarat sanitasi sehingga berpengaruh terhadap keberadaan vektor dan BPP. Kepadatan lalat >6 ditemukan pada beberapa bulan selama tahun 2019 hal ini disebabkan oleh pada tempat pembuangan sampah sementara yang ada di area bandara masih terbuka dan bercampur antara sampah organik dan sampah an organik.

Tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu dengan rodenticida pada hasil pengamatan ditemukan indeks pinjal ≥ 1 , pengendalian dengan larvasida pada container yang ditemukan keberadaan jentik *Aedes aegypti* dan fogging untuk pengendalian nyamuk dewasa. Untuk pengendalian larva *Anopheles sp* dilakukan pengadaan larvasida biologi yaitu *Bacillus thuringiensis israelensis*, dan sebagai bentuk pengendalian kecoa yaitu perangkap yang digunakan jenis sticky trap selain digunakan untuk pengamatan juga berperan

sebagai pengendalian yaitu mengurangi investasi kecoa pada lokasi pengamatan selanjutnya dilakukan monitoring evaluasi terhadap pest control yang menangani lokasi yang ditemukan kecoa dan lalat. Untuk pengendalian lalat yaitu dengan spraying.

b) Pelabuhan Makassar

Tabel III.22 Nilai Indeks di Wilayah Kerja Pelabuhan Makassar KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

Wilayah Kerja	Indikator	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Pelabuhan Makassar	Nilai Indeks pinjal ≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	12	23	0	0	0
	HI Perimeter = 0	18	22	35	80	22	15	13	0	3,5	10	9	3,5
	HI Buffer < 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tidak ditemukan Larva Anopheles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kepadatan kecoa rendah	0	0	0	0	0	0	4	12	12	16	20	10
	kepadatan lalat < 6	0	8	2	8	23	11	5	25	13	15	30	5

Berdasarkan Tabel III.22 Pada bulan Agustus dan September di Pelabuhan Makassar ditemukan nilai indeks pinjal ≥ 1 . Keberadaan tikus di Pelabuhan dipengaruhi oleh banyaknya ditemukan tumpukan barang-barang pada area tertentu. Kondisi ini sangat disukai oleh tikus sebagai tempat bersempunyi selain itu pada area TPM (tempat pengolahan makanan) masih banyak TPM yang belum memenuhi syarat sanitasi seperti pada tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan air limbah yang tidak tertutup sehingga sangat disukai oleh vektor dan BPP untuk mencari sisa-sisa makanan. Keberadaan tikus tentunya berbanding lurus kemungkinan ditemukannya pinjal seperti yang kita ketahui bahwa pinjal merupakan parasit yang menjadikan tikus sebagai inang dan hidup diluar tubuh inangnya. Pinjal sangat menyukai

lingkungan yang lembab terutama pada reruntuhan yang dijadikan tempat persembunyian. Setelah dua kali pemasangan trapping ditemukan indeks pinjal ≥ 1 selanjutnya pada bulan Nopember dilakukan pengendalian secara kimia dengan menggunakan rodenticida. Untuk HI perimeter ditemukan angka HI diatas 0 pada beberapa bulan Rata-rata jentik ditemukan pada tempat penampungan dispenser. Penampungan dispenser merupakan container yang paling jarang dibersihkan oleh pemilik dan tanpa disadari tempat tersebut menjadi container perindukan dari jentik *Aedes aegypti*. Dari data pengamatan sepanjang tahun 2019 House indeks tinggi pada bulan Januari s.d April dan berangsur turun pada bulan Mei hal ini dipengaruhi oleh iklim dimana pada bulan Januari sampai dengan Maret merupakan musim hujan yang berakibat bertambahnya container-container sebagai tempat bertelur nyamuk dan House indeks tertinggi pada bulan April, yang merupakan musim pancaroba sehingga jentik akan lebih bertahan setelah menetas dari telur. Pada perimeter area tidak ditemukan keberadaan larva *Anopheles sp* hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya habitat yang berpotensi sebagai habitat larva *Anopheles sp*. Untuk survey kepadatan kecoa di Pelabuhan Makassar baru dilaksanakan pada bulan Juli s/d Desember 2019. Hal ini diakibatkan oleh ketersediaan perangkat kecoa pada bulan Januari s.d Juni 2019 tidak ada setelah dilakukan survey ditemukan hasil yang bervariasi hal ini dipengaruhi oleh masih adanya TPM (tempat pengolahan makanan) yang masih belum memenuhi syarat sanitasi sehingga berpengaruh terhadap keberadaan vektor dan BPP. Kepadatan lalat >6 ditemukan pada beberapa bulan selama tahun 2019 hal ini disebabkan oleh pada tempat pembuangan sampah sementara yang ada di area Pelabuhan masih terbuka dan bercampur antara sampah organik dan sampah an organik.

Tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu dengan rodenticida pada hasil pengamatan ditemukan indeks pinjal ≥ 1 , pengendalian dengan larvasida pada container yang ditemukan keberadaan jentik *Aedes aegypti* dan fogging untuk pengendalian nyamuk dewasa. Sebagai bentuk pengendalian kecoa yaitu perangkap yang digunakan jenis sticky trap selain digunakan untuk pengamatan juga berperan sebagai pengendalian yaitu mengurangi investasi kecoa pada lokasi pengamatan. Untuk pengendalian lalat yaitu dengan spraying.

c) Pelabuhan Bajoe

Tabel III.23 Nilai Indeks di Wilayah Kerja Pelabuhan Bajoe KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

Wilayah Kerja	Indikator	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Pelabuhan Bajoe	Nilai Indeks pinjal ≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HI Perimeter = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HI Buffer < 1	8	19	14,15	6	3,92	15,53	12	3,92	8	16,35	0	2
	Tidak ditemukan Larva Anopheles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kepadatan kecoa rendah	4	0	0	2	0	1	0	2	3	2	0	1
	kepadatan lalat < 6	7	7	2	1	2	3	3	2	2	3	2	2

Berdasarkan Tabel III.23 Pada tahun 2019 tidak didapatkan pinjal dari penangkapan tikus yang dilakukan di Pelabuhan Bajoe. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pinjal di Pelabuhan Bajoe memenuhi syarat setiap bulan. Pada tahun 2019 jumlah tikus tertangkap sebanyak 14 ekor tikus dan sudah dilakukan penyisiran dan tidak didapatkan pinjal, sehingga dapat dikatakan bahwa tikus yang terdapat di pelabuhan Bajoe tidak membawa ekto parasit berupa pinjal. Untuk pengamatan jentik nyamuk *Aedes aegypti* di pelabuhan Bajoe dilakukan di wilayah Perimeter dan Buffer Pelabuhan. Hasil yang diperoleh pada

pengamatan di wilayah perimeter menunjukkan hasil yang memenuhi syarat baik HI setiap bulan maupun rata-rata tahun 2019, hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah bangunan yang ada di dalam pelabuhan. Selain itu kerjasama dan perhatian Lintas Sektor dalam menjaga kebersihan di dalam pelabuhan cukup tinggi. Adapun kegiatan pengamatan jentik *Aedes aegypti* yang dilakukan pada wilayah buffer sepanjang tahun 2019 tidak memenuhi syarat House Indeks. Lingkungan sekitar wilayah buffer merupakan pemukiman kumuh dan perilaku masyarakatnya yang tidak menjaga kebersihan. Kondisi wilayah yang sulit mendapatkan air bersih (air tawar) sehingga masyarakat menampung air sebanyak-banyaknya dan banyak yang tidak menutup tempat penampungan airnya sehingga menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk *Aedes aegypti*.

Hasil pengamatan Larva *Anopheles* tahun 2019 yang dilakukan di wilayah perimeter pelabuhan Bajoe, tidak ditemukan adanya larva sehingga dapat dikatakan indeks larva *Anopheles* memenuhi syarat. Habitat larva *Anopheles* juga tidak ditemukan di dalam wilayah perimeter.

Kepadatan kecoa di pelabuhan Bajoe pada tahun 2019 rendah atau memenuhi syarat. Kondisi pelabuhan yang tetap terjaga kebersihannya sehingga tidak menjadi tempat berkembang biaknya kecoa dipelabuhan.

Hasil pengukuran kepadatan lalat di pelabuhan Bajoe tahun 2019, secara umum memenuhi syarat meskipun pada bulan Januari dan Februari melewati batas maksimum yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim buah-buahan. Kondisi kebersihan di pelabuhan Bajoe yang terjaga secara rutin dilakukan oleh cleaning service pelabuhan yang dikoordinir pengelola Pelabuhan dalam hal ini PT ASDP Indonesia Ferry. Pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah pelabuhan yang rutin oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Bone sehingga TPS sampah

pelabuhan tidak menjadi tempat perkembang biakan vektor lalat.

Tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu dengan rodenticida pada hasil pengamatan ditemukan indeks pinjal ≥ 1 , pengendalian dengan larvasida pada container yang ditemukan keberadaan jentik *Aedes aegypti* dan fogging untuk pengendalian nyamuk dewasa. Sebagai bentuk pengendalian kecoa yaitu perangkap yang digunakan jenis sticky trap selain digunakan untuk pengamatan juga berperan sebagai pengendalian yaitu mengurangi investasi kecoa pada lokasi pengamatan. Untuk pengendalian lalat yaitu dengan spraying.

d) Pelabuhan Parepare

Tabel III.24 Nilai Indeks di Wilayah Kerja Pelabuhan Parepare KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

Wilayah Kerja	Indikator	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Pelabuhan Parepare	Nilai Indeks pinjal ≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HI Perimeter = 0	6,6	6,4	6,3	6,3	6,6	6,6	0	0	0	0	0	0
	HI Buffer < 1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8	0	0	0	0	0
	Tidak ditemukan Larva Anopheles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kepadatan kecoa rendah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kepadatan lalat < 6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan Tabel III.24 Pada tahun 2019 tidak didapatkan pinjal dari penangkapan tikus yang dilakukan di Pelabuhan Parepare. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pinjal di Pelabuhan Parepare memenuhi syarat setiap bulan. Pada tahun 2019 jumlah tikus tertangkap sebanyak 38 ekor tikus dan sudah dilakukan penyisiran dan tidak didapatkan pinjal, sehingga dapat dikatakan bahwa tikus yang terdapat di pelabuhan Parepare tidak membawa ekto parasit berupa pinjal.

Untuk pengamatan jentik nyamuk *Aedes aegypti* di pelabuhan Parepare dilakukan di wilayah Perimeter dan Buffer Pelabuhan. Hasil yang diperoleh pada pengamatan di wilayah perimeter menunjukkan hasil yang fluktuatif dimana pada bulan Januari s.d Juni diperoleh house indeks lebih dari 0 atau tidak memenuhi syarat hal ini disebabkan oleh iklim, dimana pada bulan tersebut memasuki musim hujan sehingga banyak container yang terisi air selain itu banyaknya penampungan air yang ada di perimeter area. Salah satunya pada pedagang yang ada di Pelabuhan, tidak semua pedagang pada tempat penjualannya dilengkapi dengan kran air sehingga banyak pedagang yang menampung air. Sehingga air yang ditampung menjadi tempat perindukan jentik nyamuk. Sama halnya dengan buffer area tidak memenuhi syarat House Indeks. Setiap kali melakukan survey diberikan penyuluhan kepada masyarakat pelabuhan mengenai 3M +. Pada bulan Juli s.d Desember diperoleh house indeks 0. Hal ini dipengaruhi oleh iklim dimana pada bulan tersebut merupakan musim kemarau sehingga keberadaan kontainer-kontainer yang sebelumnya terisi air menjadi kering. Selain itu perubahan perilaku masyarakat yang sebelumnya penampungan airnya tidak ditutup setelah diberikan penyuluhan masyarakat sudah menutup penampungan airnya. Pada perimeter area tidak ditemukan keberadaan larva *Anopheles sp* hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya habitat yang berpotensi sebagai habitat larva *Anopheles sp*. Kepadatan kecoa di pelabuhan Parepare pada tahun 2019 rendah atau memenuhi syarat. Kondisi pelabuhan yang tetap terjaga kebersihannya sehingga tidak menjadi tempat berkembang biaknya kecoa di pelabuhan. Hasil pengukuran kepadatan lalat di pelabuhan Parepare tahun 2019, secara umum memenuhi syarat meskipun pada bulan Februari ditemukan adanya inpestasi lalat hal ini dipengaruhi oleh musim hujan dan musim buah-buahan.

Tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu dengan rodenticida pada hasil pengamatan ditemukan indeks pinjal ≥ 1 , pengendalian dengan larvasida pada container yang ditemukan keberadaan jentik *Aedes aegypti* dan fogging untuk pengendalian nyamuk dewasa. Sebagai bentuk pengendalian kecoa yaitu perangkap yang digunakan jenis sticky trap selain digunakan untuk pengamatan juga berperan sebagai pengendalian yaitu mengurangi investasi kecoa pada lokasi pengamatan. Untuk pengendalian lalat yaitu dengan spraying.

e) Pelabuhan Palopo

Tabel III.25 Nilai Indeks di Wilayah Kerja Pelabuhan Palopo KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

Wilayah Kerja	Indikator	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Pelabuhan Palopo	Nilai Indeks pinjal ≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HI Perimeter = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HI Buffer < 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tidak ditemukan Larva Anopheles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kepadatan kecoa rendah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kepadatan lalat < 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan Tabel III.25 Pada tahun 2019 tidak didapatkan pinjal dari penangkapan tikus yang dilakukan di Pelabuhan Palopo. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pinjal di Pelabuhan Palopo memenuhi syarat setiap bulan. Pada tahun 2019 jumlah tikus tertangkap sebanyak 26 ekor tikus dan sudah dilakukan penyisiran dan tidak didapatkan pinjal, sehingga dapat dikatakan bahwa tikus yang terdapat di pelabuhan Palopo tidak membawa ekto parasit berupa pinjal. Untuk pengamatan jentik nyamuk *Aedes aegypti* di pelabuhan Palopo dilakukan di wilayah Perimeter dan Buffer Pelabuhan. Hasil

yang diperoleh pada pengamatan di wilayah perimeter dan buffer menunjukkan hasil yang memenuhi syarat baik HI setiap bulan maupun rata-rata tahun 2019, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang menjaga kebersihan. Pada perimeter area tidak ditemukan keberadaan larva *Anopheles sp* hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya habitat yang berpotensi sebagai habitat larva *Anopheles sp*. Kepadatan kecoa dan lalat di pelabuhan Palopo pada tahun 2019 memenuhi syarat. Kondisi pelabuhan yang tetap terjaga kebersihannya sehingga tidak menjadi tempat berkembang biaknya kecoa dan lalat dipelabuhan.

Tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu dengan rodenticida pada hasil pengamatan ditemukan indeks pinjal ≥ 1 , pengendalian dengan larvasida pada container yang ditemukan keberadaan jentik *Aedes aegypti* dan fogging untuk pengendalian nyamuk dewasa. Sebagai bentuk pengendalian kecoa yaitu perangkap yang digunakan jenis sticky trap selain digunakan untuk pengamatan juga berperan sebagai pengendalian yaitu mengurangi investasi kecoa pada lokasi pengamatan. Untuk pengendalian lalat yaitu dengan spraying.

f) Pelabuhan Awerange

Tabel III.26 Nilai Indeks di Wilayah Kerja Pelabuhan Awerange KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

Wilayah Kerja	Indikator	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Pelabuhan Awerange	Nilai Indeks pinjal ≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HI Perimeter = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HI Buffer < 1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0
	Tidak ditemukan Larva <i>Anopheles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kepadatan kecoa rendah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kepadatan lalat < 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan Tabel III.26 Pada tahun 2019 tidak didapatkan pinjal dari penangkapan tikus yang dilakukan di Pelabuhan Awerange. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pinjal di Pelabuhan Awerange memenuhi syarat setiap bulan. Pada tahun 2019 jumlah tikus tertangkap sebanyak 15 ekor tikus dan sudah dilakukan penyisiran dan tidak didapatkan pinjal, sehingga dapat dikatakan bahwa tikus yang terdapat di pelabuhan Awerange tidak membawa ekto parasit berupa pinjal. Untuk pengamatan jentik nyamuk *Aedes aegypti* di pelabuhan Awerange dilakukan di wilayah Perimeter dan Buffer Pelabuhan. Hasil yang diperoleh pada pengamatan di wilayah perimeter menunjukkan hasil yang memenuhi syarat baik HI setiap bulan maupun rata-rata tahun 2019, hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah bangunan yang ada di dalam pelabuhan serta terjaganya kebersihan di area pelabuhan. Selain itu kerjasama dan perhatian Lintas Sektor dalam menjaga kebersihan di dalam pelabuhan cukup tinggi. Adapun kegiatan pengamatan jentik *Aedes aegypti* yang dilakukan pada wilayah buffer sepanjang tahun 2019 ditemukan adanya jentik *Aedes aegypti*. Keberadaan jentik di area tersebut masih dalam kategori rendah sehingga masih memenuhi syarat House Indeks. Pada perimeter area tidak ditemukan keberadaan larva *Anopheles sp* hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya habitat yang berpotensi sebagai habitat larva *Anopheles sp*. Kepadatan kecoa dan lalat di pelabuhan Awerange pada tahun 2019 memenuhi syarat. Kondisi pelabuhan yang tetap terjaga kebersihannya sehingga tidak menjadi tempat berkembang biaknya kecoa dan lalat dipelabuhan.

Tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu dengan rodenticida pada hasil pengamatan ditemukan indeks pinjal ≥ 1 , pengendalian dengan larvasida pada container yang ditemukan keberadaan jentik *Aedes aegypti* dan fogging untuk pengendalian nyamuk dewasa. Sebagai bentuk pengendalian

kecoa yaitu perangkat yang digunakan jenis sticky trap selain digunakan untuk pengamatan juga berperan sebagai pengendalian yaitu mengurangi investasi kecoa pada lokasi pengamatan. Untuk pengendalian lalat yaitu dengan spraying.

g) Pelabuhan Malili

Tabel III.27 Nilai Indeks di Wilayah Kerja Pelabuhan Malili KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

Wilayah Kerja	Indikator	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Pelabuhan Malili	Nilai Indeks pinjal ≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HI Perimeter = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HI Buffer < 1	1,72	1,66	1,78	1,49	1,72	1,78	1,92	1,85	1,75	1,92	1,5	1,96
	Tidak ditemukan Larva Anopheles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kepadatan kecoa rendah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kepadatan lalat < 6	2	1,9	1,8	2	2	1,8	1,6	1,4	1,6	1,8	2	1,4

Berdasarkan Tabel III.27 Pada tahun 2019 tidak didapatkan pinjal dari penangkapan tikus yang dilakukan di Pelabuhan Malili. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pinjal di Pelabuhan Malili memenuhi syarat setiap bulan. Pada tahun 2019 jumlah tikus tertangkap sebanyak 22 ekor tikus dan sudah dilakukan penyisiran dan tidak didapatkan pinjal, sehingga dapat dikatakan bahwa tikus yang terdapat di pelabuhan Malili tidak membawa ekto parasit berupa pinjal. Untuk pengamatan jentik nyamuk *Aedes aegypti* di pelabuhan Malili dilakukan di wilayah Perimeter dan Buffer Pelabuhan. Hasil yang diperoleh pada pengamatan di wilayah perimeter menunjukkan hasil yang memenuhi syarat baik HI setiap bulan maupun rata-rata tahun 2019, hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah bangunan yang ada di dalam pelabuhan serta terjaganya

kebersihan di area pelabuhan. Adapun kegiatan pengamatan jentik *Aedes aegypti* yang dilakukan pada wilayah buffer sepanjang tahun 2019 tidak memenuhi syarat House Indeks. Lingkungan sekitar wilayah buffer merupakan pemukiman penduduk, perilaku masyarakatnya yang tidak menjaga kebersihan sehingga wilayah house indeks buffer pelabuhan tidak memenuhi syarat. Hasil pengamatan Larva *Anopheles* tahun 2019 yang dilakukan di wilayah perimeter pelabuhan Malili, tidak ditemukan adanya larva sehingga dapat dikatakan indeks larva *Anopheles* memenuhi syarat. Habitat larva *Anopheles* juga tidak ditemukan di dalam wilayah perimeter. Kepadatan kecoa dan lalat di pelabuhan Malili pada tahun 2019 memenuhi syarat. Kondisi pelabuhan yang tetap terjaga kebersihannya sehingga tidak menjadi tempat berkembang biaknya kecoa dan lalat dipelabuhan.

Tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu dengan rodenticida pada hasil pengamatan ditemukan indeks pinjal ≥ 1 , pengendalian dengan larvasida pada container yang ditemukan keberadaan jentik *Aedes aegypti* dan fogging untuk pengendalian nyamuk dewasa. Untuk pengendalian larva *Anopheles sp* dilakukan pengadaan larvasida biologi yaitu *bacillus thuringiensis israelensis*, dan sebagai bentuk pengendalian kecoa yaitu perangkap yang digunakan jenis sticky trap selain digunakan untuk pengamatan juga berperan sebagai pengendalian yaitu mengurangi investasi kecoa pada lokasi pengamatan selanjutnya dilakukan monitoring evaluasi terhadap pest control yang menangani lokasi yang ditemukan kecoa dan lalat. Untuk pengendalian lalat yaitu dengan spraying.

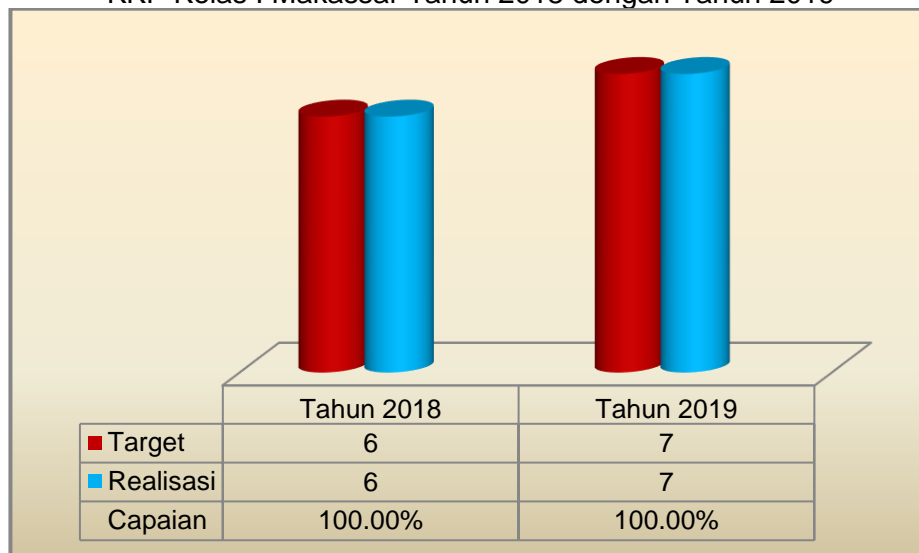
Pelaksanaan kegiatan pengamatan/ pengendalian vektor dan BPP yang merupakan indikator kinerja dilaksanakan setiap bulannya. Tindakan pengendalian dilakukan apabila dari hasil pengamatan diperoleh hasil yang melebihi nilai ambang batas. Jika dihitung proporsi selama 12 kali pengamatan serta

tindakan pengendalian maka rata-rata sepanjang tahun mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh tindakan pengendalian yang dilakukan terhadap indikator-indikator pengamatan yang tidak memenuhi syarat sehingga Capaian kinerja pada tahun ini mencapai target yang telah ditentukan yaitu 100 %. Disebabkan karena dari tujuh wilker yang ditargetkan menjadi wilayah bebas vektor semuanya melaksanakan pengamatan vektor dan BPP dengan rutin setiap bulan. Selanjutnya apabila hasil pengamatan melebihi nilai baku mutu yang dipersyaratkan maka dilakukan upaya pengendalian.

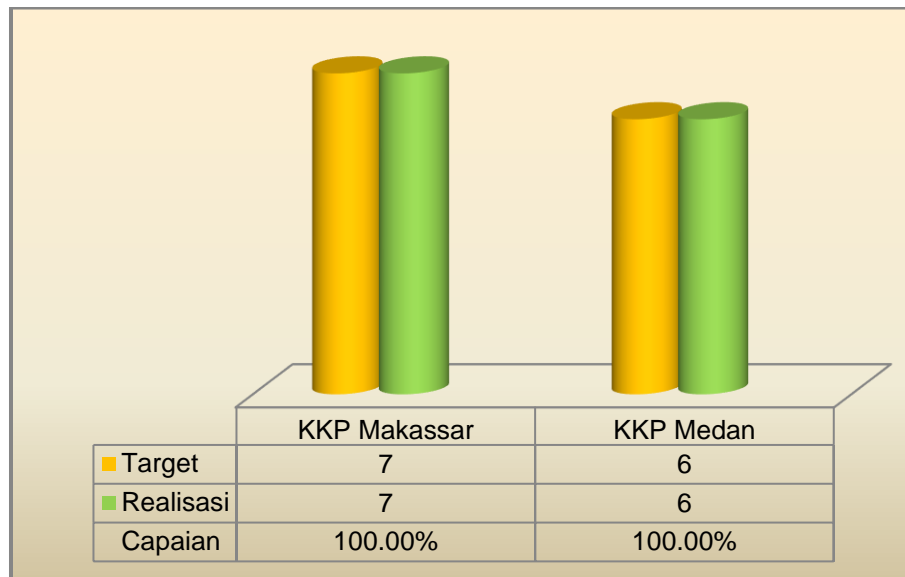
Tabel III.28 RAP, RAK dan Realisasi tahun 2019 Indikator Kedelapan KKP Kelas I Makassar

RAP	RAK	Capaian (%)
100%	100%	100 %

Grafik III.17 Perbandingan Capaian Indikator ke-8 KKP Kelas I Makassar Tahun 2018 dengan Tahun 2019



Grafik III.18 Perbandingan Capaian Indikator ke-8 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



5) Analisis Keberhasilan Kegiatan

- a) Kegiatan pengendalian vektor di Pelabuhan dan Bandara dalam rangka wilayah bebas vektor untuk menurunkan populasi vektor sehingga keberadaannya tidak beresiko untuk terjadinya penularan penyakit di suatu wilayah meliputi kegiatan pemberantasan tikus dan pinjal, pengamatan dan pemberantasan larva/ jentik serta nyamuk dewasa, pengamatan dan pengendalian kecoa serta pengamatan dan pengendalian lalat.
- b) Untuk pelaksanaan kegiatan pada wilayah kerja yang melebihi baku mutu indikator yang dipersyaratkan dilakukan upaya pengendalian sesuai dengan petunjuk teknis ataupun peraturan yang mengatur tentang upaya pengendalian vektor dan BPP untuk menekan jumlah ataupun indeks-indeks yang melebihi bakumutu sampai dengan memenuhi syarat. Sehingga upaya pengendalian dikategorikan sebagai keberhasilan pelaksanaan program untuk mendukung indikator penilaian kinerja.

- c) Pada tahun 2018 dan 2019 telah dilaksanakan Diklat Pengendalian Vektor dan BPP di bandara dan pelabuhan yang mencakup KKP Wilayah Indonesia Timur sebanyak dua angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 30 Orang untuk masing-masing angkatan pada tahun 2018 dan KKP se Indonesia sebanyak dua angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 30 Orang untuk masing-masing angkatan pada tahun 2019. Diklat pengendalian vektor bagi petugas KKP bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang melaksanakan pengendalian vektor dan BPP bagi petugas KKP. KKP Kelas I Makassar merupakan satu diantara 5 (lima) KKP yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan Diklat pengendalian vektor dan BPP dengan fokus pelatihan mengenai nyamuk, lalat dan kecoa. Proporsi peserta diklat untuk KKP Kelas I Makassar diikuti oleh semua tenaga Entomolog kesehatan, dan perwakilan dari masing-masing wilayah kerja KKP Kelas I Makassar. Bagi wilayah kerja yang tidak memiliki tenaga Entomolog kesehatan/ Sanitarian maka diikuti oleh petugas yang berprofesi sebagai Dokter/ Perawat/ Epidemiolog Kesehatan yang bertugas pada wilayah kerja tersebut. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM bagi seluruh petugas KKP dalam pengendalian vektor dan BPP serta untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan program tersebut.
- d) Selain itu petugas Entomolog Kesehatan dan petugas pelaksana pengendalian vektor dan BPP ditugaskan untuk mengikuti pertemuan, seminar, kursus yang berhubungan dengan pengendalian vektor baik yang diselenggarakan oleh KKP maupun lembaga/ instansi lainnya.
- e) Alokasi anggaran untuk mendukung keberhasilan indikator kinerja pada pagu anggaran tahun 2019 telah dialokasikan dana pada satuan biaya keluaran (SBK) 2019 untuk

pengamatan larva dan Nyamuk *Anopheles sp* yang merupakan vektor penyebab penyakit malaria dan merupakan indikator kinerja tahun 2019. Selain itu alokasi anggaran untuk kader pengendalian vektor dan BPP sangat membantu dalam pelaksanaan pengamatan dan pengendalian vektor sehingga capaian indikator kinerja bisa lebih dimaksimalkan.

- f) Monitoring dan evaluasi dalam rangka uji efikasi/ resistensi bahan kimia yang digunakan telah dilaksanakan di wilayah kerja Pelabuhan Bajoe, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Palopo, dan Pelabuhan Malili.
- g) Pelaksanaan pertemuan koordinasi dan sosialisasi program pengendalian vektor dan BPP dilaksanakan pada beberapa wilayah kerja. Peserta pertemuan adalah lintas sektor dan lintas program. Kegiatan ini bertujuan untuk penyebarluasan informasi serta peningkatan sinergitas untuk pelaksanaan program pengendalian vektor dan BPP di pelabuhan dan bandara.
- h) Petugas wilker ke induk untuk berkonsultasi mengenai pelaksanaan program pengendalian vektor dan BPP di wilayah kerja. Selain itu koordinasi dan konsultasi teknis pengendalian vektor ke Direktorat P2PTVZ juga dilaksanakan agar pengendalian vektor dan binatang penular penyakit lebih terarah dan bersinergi dengan program nasional. Konsultasi dan koordinasi dilaksanakan oleh pejabat struktural dan fungsional yang melaksanakan pengendalian vektor dan BPP. Konsultasi teknis dilaksanakan sebelum dan setelah dilakukannya kegiatan-kegiatan teknis pengendalian vektor dan BPP berupa pengamatan/ pemantauan sampai dengan intervensi pengendaliannya sehingga kegiatan pengendalian vektor dan BPP bisa lebih terarah dan bersinergi dengan program/ kebijakan nasional

- 6) Masalah yang dihadapi

- a) Pelaksanaan tugas kegiatan pengendalian vektor dan BPP belum dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Teknis tertentu.
 - b) Koordinasi pelaksanaan program pengendalian vektor di wilayah kerja belum optimal.
 - c) Perlu pengembangan/ inovasi secara terus menerus mengenai metode pengendalian vektor
 - d) Perilaku masyarakat yang tidak menjaga kebersihan dan tidak menjaga agar tempat penampungan air terbebas dari akses nyamuk *Aedes aegypti* meletakkan telurnya.
- 7) Usul pemecahan masalah
- a) Penambahan tenaga entomolog kesehatan sehingga kebutuhan tenaga entomolog kesehatan bisa terpenuhi pada semua wilayah kerja.
 - b) Peningkatan Koordinasi dan advokasi ke lintas sektor dn lintas program mengenai pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor.
 - c) Perlu dilakukan pendampingan terhadap wilayah kerja yang belum memiliki tenaga entomolog kesehatan untuk menunjang program pengendalian vektor dan BPP di wilayah kerja.
 - d) Keberlanjutan pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi yang terkait Pelabuhan/ Bandara bebas vektor untuk meningkatkan wawasan kepada komunitas dan masyarakat pelabuhan dan bandara.
 - e) Pengendalian harus ditingkatkan baik dengan secara fisik, biologi, mekanik dan kimia.
- 8) Analisis Efisiensi Sumber Daya
- a) Penggunaan anggaran dioptimalkan pada pembelian bahan dan kelengkapan pengendalian vector dan BPP;
 - b) Petugas di wilker yang jumlahnya terbatas sehingga satu petugas melaksanakan lebih dari satu kegiatan. Kegiatan dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan yang lainnya.

b. Realisasi Anggaran

Tabel III.29 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kedelapan
Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Monev Resistensi / Efikasi Insektisida (Awerange, Parepare, Palopo, Bulukumba)	54.882.000	52.373.000	95,43 %
2	Bahan dan kelengkapan pengendalian vektor	128.095.000	122.515.000	95,64 %
3	Pertemuan Koordinasi dan sosialisasi Program Pengendalian Vektor dan PBB	54.998.000	54.792.556	99,63 %
4	Koordinasi dan Konsultasi Wilker ke Induk	38.400.000	37.752.500	98,31 %
5	Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pengendalian Vektor	56.560.000	56.559.008	100 %
6	Monitoring Program Pengendalian Vektor	22.730.000	22.458.000	98,80 %
7	Fogging	42.750.000	41.211.000	96,40 %
8	Pemetaan Layanan Survey Vektor Pes	1.848.000	999.000	54,06 %
9	Persiapan Bahan dan Alat Layanan Survey Vektor Pes	16.008.000	15.663.000	97,84 %
10	Pemasangan Perangkat	31.392.000	27.950.000	89,04 %
11	Identifikasi Tikus dan Pinjal	480.000	480.000	100 %
12	Spraying	12.810.000	8.880.000	69,32 %
13	Praying IRS	6.135.000	0	0
14	Survey dan larvasida layanan vektor DBD	41.250.000	36.247.000	87,87 %
15	Survey dan larvasida layanan vector Diare	4.725.000	3.225.000	68,25 %
16	Survey jentik layanan survey vektor malaria	1.260.000	0	0
17	Survey nyamuk layanan survey vektor malaria	45.450.000	39.138.000	86,11 %
Total		559.773.000	520.243.064	92,94 %

Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 520.243.064,- (92,94%).

9. INDIKATOR KESEMBILAN

Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

Target jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung pada tahun 2019 adalah sebanyak 2.325 orang.

a. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pengertian

Skrining penyakit menular langsung adalah skrining yang dilakukan untuk deteksi penyakit HIV & AIDS dengan pemeriksaan *Rapid Diagnostik Test*, TB paru dengan pemeriksaan mikroskopik (pewarnaan *Ziehl-Neelsen*).

2) Definisi Operasional

Jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit menular meliputi penyakit , HIV/AIDS dan TB.

3) Rumus (cara perhitungan)

Akumulasi jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit menular meliputi penyakit HIV/AIDS dan TB dalam satu tahun

$$\frac{\text{Jumlah orang yang melaksanakan skrining PML}}{\text{Jumlah target skrining PML}} \times 100 \%$$

4) Capaian Kinerja

$$\frac{2.720}{2.325} \times 100 \% = 116,99 \%$$

Jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit menular langsung pada tahun 2019 sebanyak 2.720 orang. Jumlah ini telah

melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 2.325 orang, dengan persentase keberhasilan sebesar 116,99 %.

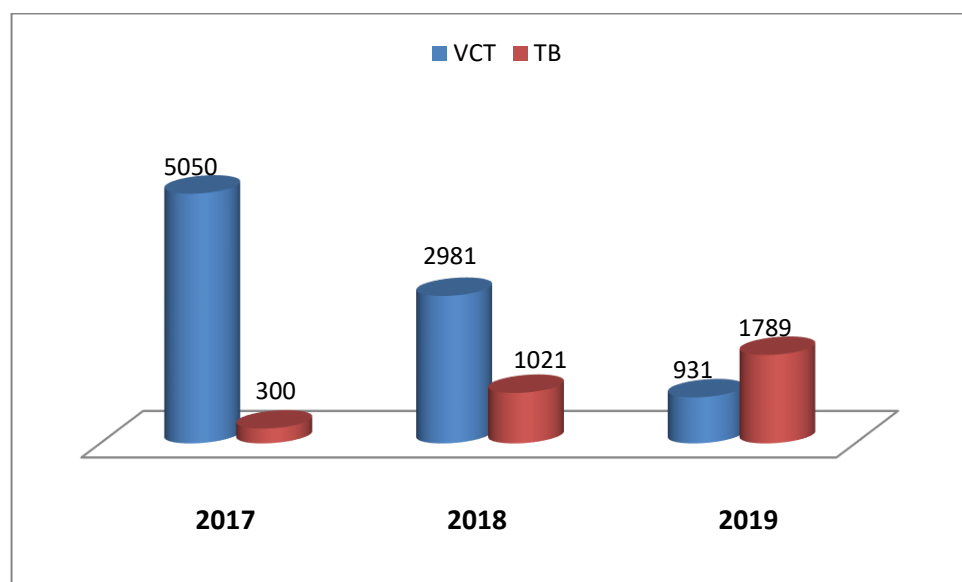
Tabel III.30 Pemeriksaan PML KKP Kelas I Makassar dalam periode tahun 2017 – 2019

Tahun	VCT	TB	KUSTA	Jumlah
2017	5.050	300	40	5.390
2018	2.981	1.021	0	4.002
2019	931	1.789	0	2.720

Pada tabel di atas menunjukkan jumlah orang yang telah dilakukan skrining PML termasuk didalamnya VCT dan TB. Untuk tahun 2017 sebanyak 5.390 orang, tahun 2018 sebanyak 4.002 orang, dan tahun 2019 sebanyak 2.720 orang.

Adapun gambaran skrining PML yang telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik III.19 Pemeriksaan PML dalam Kurun 2017 – 2019



Untuk skrining TB, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal ini seiring dengan

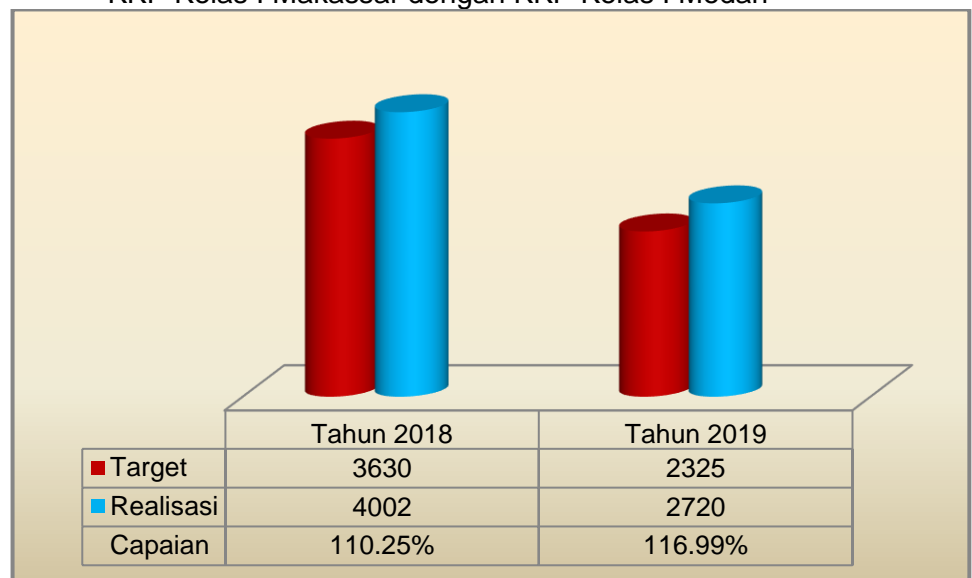
adanya program pemerintah dalam rangka eliminasi TB tahun 2030.

Tabel III.31 RAP, RAK dan Realisasi tahun 2019
Indikator Kesembilan KKP Kelas I Makassar

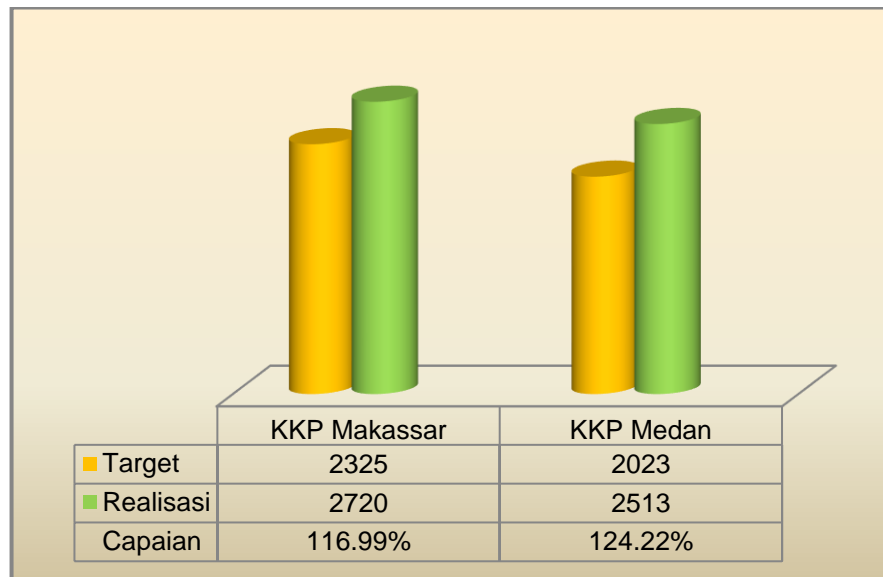
RAP	RAK	Capaian
100%	100%	116,99 %

Dari tabel di atas tergambar bahwa pada tahun 2019, target jumlah skrining PML telah tercapai dan telah mendukung target pencapaian RAP, yakni Persentase deteksi dini penyakit menular langsung Pelabuhan/Bandara/PLBD sebesar 116,99 %.

Grafik III.20 Perbandingan Capaian Indikator Ke-9
KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



Grafik III.21 Perbandingan Capaian Indikator Ke-9
KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



5) Analisis Keberhasilan Kegiatan

- a) Kegiatan skrining penyakit menular langsung terlaksana berkat kerja sama yang baik antara Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan stakeholder di wilayah kerja pelabuhan/ bandara.
- b) Adanya kesadaran pengguna/penyedia jasa di wilayah kerja pelabuhan/ bandara untuk memeriksakan kesehatannya.
- c) Bentuk kerjasama dari Dinas Kesehatan berupa pemberian Reagen dan bahan habis pakai.

6) Masalah yang dihadapi

Belum tersedia atau kurangnya tempat yang memadai dalam melakukan pemeriksaan untuk menjaga kenyamanan dan rahasia medis pasien.

7) Usul pemecahan masalah

Perlu koordinasi dengan stakeholder untuk penyediaan tempat pemeriksaan yang representatif.

8) Analisis efisiensi sumber daya

- a) Sumber daya manusia yang diberdayakan pada kegiatan skrining penyakit menular langsung adalah dokter, perawat, surveilans dan laboran yang berkompeten dari KKP Kelas I Makassar.
- b) Dana yang digunakan untuk skrining PML bersumber dari dana DIPA KKP Kelas I Makassar.
- c) Bantuan reagen dan bahan habis pakai dari Dinas Kesehatan.

b. Realisasi Anggaran

Tabel III.32 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kesembilan Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara, termasuk Malaria Cross Border	52.520.000	52.519.500	100 %
2	Pertemuan Surveilans Migrasi di Bandara dan Pelabuhan	30.825.000	29.774.000	96,59 %
3	Sosialisasi dan Deteksi Dini HIV - AIDS (VCT Mobile) di Wilayah Kerja	47.115.000	44.614.500	94,69 %
4	Evaluasi Hasil Deteksi Dini HIV- AIDS di Wilayah Kerja	46.392.000	40.133.400	86,51 %
5	Biaya alat habis pakai layanan tes HIV dan IMS di KKP	40.875.000	40.865.000	99,98 %
6	Deteksi dini penyakit TB di Wilayah Kerja Pelabuhan / Bandara	45.785.000	33.031.549	72,14 %
7	Biaya alat habis pakai layanan deteksi dini terduga TB di Wilker KKP	59.215.000	41.951.000	70,85 %
Total		322.727.000	282.888.949	87,66 %

Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 282.888.949,- (87,66%).

Realisasi anggaran hanya 87,66% tidak seiring dengan capaian kerja yang melampaui target sebesar 116,99%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Untuk kegiatan Evaluasi Hasil Deteksi Dini HIV-AIDS di Wilayah Kerja terdapat proses negoisasi tempat pelaksanaan kegiatan, sehingga terdapat efisiensi harga. Hal ini mengakibatkan tidak terealisasinya secara maksimal anggaran pelaksanaan kegiatan.
- 2) Kegiatan deteksi dini Penyakit TB dan HIV-Aids di wilker Pelabuhan/Bandara dilaksanakan bersamaan, sehingga biaya konsumsi kegiatan yang dianggarkan untuk 2 (dua) kegiatan, hanya terealisasi 1 (satu) kegiatan, hal ini mengakibatkan realisasi anggaran untuk deteksi dini penyakit TB tidak terealisasi maksimal.

10. INDIKATOR KESEPULUH

Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

Target Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada tahun 2019 adalah sebanyak 48 dokumen yakni:

- RKAKL/DIPA awal sebanyak 1 dokumen
- RKAKL/DIPA revisi sebanyak 1 dokumen
- Laporan Tahunan sebanyak 1 dokumen
- Laporan keuangan sebanyak 2 dokumen
- Laporan BMN sebanyak 2 dokumen
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) sebanyak 1 dokumen
- Profil KKP Kelas I Makassar sebanyak 1 dokumen
- Proposal PNBP sebanyak 1 dokumen
- Dokumen kepegawaian (kontrak dan penilaian SKP) sebanyak 2 dokumen
- Laporan Monev DJA sebanyak 12 dokumen
- Laporan e-Monev Bappenas sebanyak 12 dokumen
- Laporan Eksekutif Bulanan (LEB) sebanyak 12 dokumen.

a. Capaian Kinerja Organisasi

- 1) Pengertian

Jumlah dokumen dukungan manajemen di KKP Kelas I Makassar yang diolah di Bagian Tata Usaha.

2) Definisi Operasional

Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 12 jenis Dokumen antara lain RKAKL/DIPA, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Lakip, Profil, Proposal PNBP, Dokumen Kepegawaian, e-Monev DJA, e-Monev Bappenas, LEB dalam periode satu tahun.

3) Rumus (cara perhitungan)

Akumulasi jumlah dokumen sebanyak 48 dokumen terdiri dari RKAKL/DIPA (awal dan revisi) 2 dokumen, Laptah 1 dokumen, Laporan Keuangan 2 dokumen, Laporan BMN 2 dokumen, Lakip 1 dokumen, Profil 1 dokumen, Proposal PNBP 1 dokumen, dokumen kepegawaian 2 dokumen (kontrak dan penilaian), e-monev DJA 12 dokumen, e-monev Bappenas 12 dokumen, LEB 12 dokumen

$$\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen dukungan manajemen}}{\text{Target jumlah dokumen dukungan manajemen}} \times 100\%$$

4) Capaian Kinerja

$$\frac{49}{48} \times 100\% = 102,08 \%$$

Realisasi capaian kinerja untuk indikator jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya adalah sebanyak 49 dokumen dari 48 dokumen yang ditargetkan (102,08 %). Adapun target dan capaian indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.33 Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Indikator Keduabelas Perjanjian Kinerja

KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Dokumen	Target (Dok)	Capaian (Dok)	Capaian %	Target RAP
1	RKAKL/DIPA Awal	1	1	100	Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk sebesar 90 % dengan target sebesar 80 %
2	RKAKL/DIPA Revisi	1	1	100	Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk sebesar 90 % dengan target sebesar 80 %
3	Laporan Tahunan	1	1	100	Persentase laporan program Ditjen P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu sebesar 90 %
4	Laporan Keuangan	2	2	100	Persentase Satker yang menyusun Laporan Keuangan yang tepat waktu dan taat dengan peraturan Keuangan Negara yang berlaku sebesar 100%
5	Laporan BMN	2	2	100	Persentase Layanan Kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP sebesar 100%
6	LAPKIN	1	1	100	Persentase laporan program Ditjen P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu sebesar 90 %
7	Profil	1	1	100	Persentase laporan program Ditjen P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu sebesar 90 %
8	Proposal PNBPN	1	1	100	Persentase Satker yang menyusun Laporan Realisasi Penggunaan PNBPN yang sesuai dengan aturan yang berlaku sebesar 100%
9	Dokumen Kepegawaian (Kontrak dan Penilaian)	2	2	100	Persentase layanan administrasi kepegawaian sebesar 100%
10	e-Monev DJA	12	12	100	Persentase Satker Program P2P yang menerapkan manajemen

					pengelolaan data dan informasi sebesar 100 % dengan target 90 %
11	e-Monev Bappenas	12	12	100	Persentase Satker Program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi sebesar 100 % dengan target 90 %
12	Laporan Eksekutif Bulanan (LEB)	12	12	100	Persentase Satker Program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi sebesar 100 % dengan target 90 %
13	Dokumen ISO		1		Persentase Satker Program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi sebesar 100 % dengan target 90 %
Total		48	49		

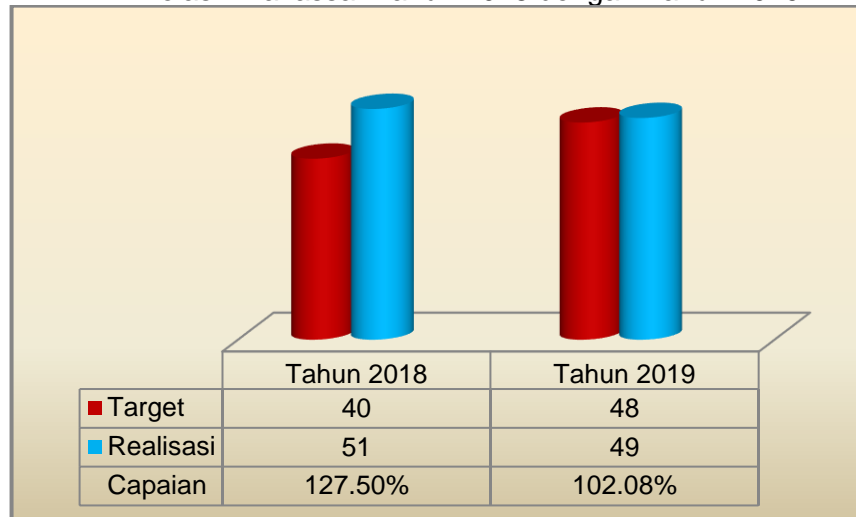
Pencapaian target tersebut di atas telah mendukung Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen P2P untuk tahun 2019 yaitu :

- a) Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk sebesar 90 % dengan target 80 %. Pada tahun 2019 tidak ada anggaran KKP Kelas I Makassar yang diblokir.
- b) Persentase laporan program Ditjen P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu sebesar 90 %. Dari 49 dokumen yang menjadi capaian kinerja, semua dokumen telah disampaikan tepat pada waktunya atau 100% sedangkan target RAP Ditjen P2P sebesar 90%. KKP Kelas I Makassar telah mendukung dan bahkan melewati target P2P. Penyusunan RKAKL telah sesuai waktu sehingga DIPA keluar dan dapat didownload melalui website keuangan. Dokumen LAKIP, Profil dan Laporan Tahunan KKP Kelas I Makassar tahun 2019 telah disampaikan tepat waktu. Ketiga dokumen tersebut juga merupakan salah satu bukti penilaian kinerja atau SKP dari pimpinan sehingga harus diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Keuangan, BMN, Proposal PNBP, Dokumen Kepegawaian (Kontrak dan Penilaian SKP), e-Monev DJA, e-Monev Bappenas dan

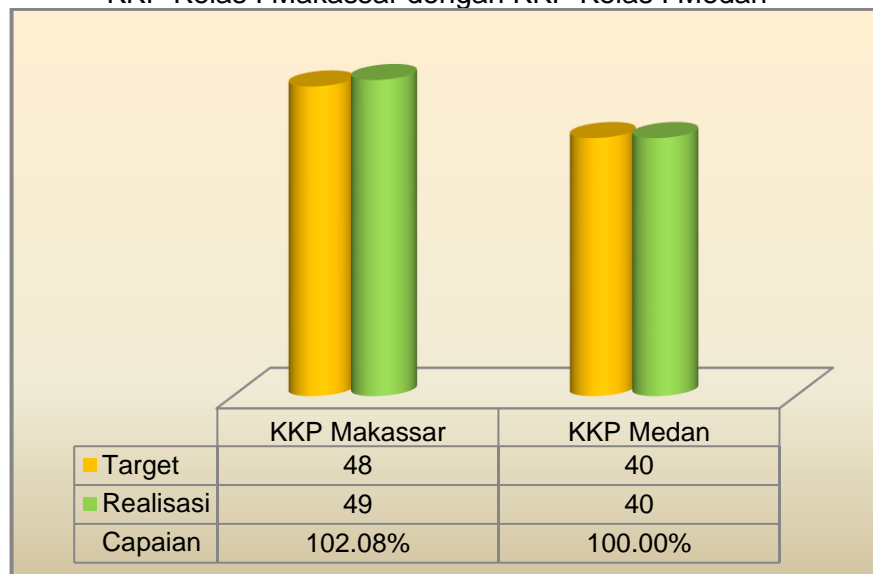
Laporan Eksekutif Bulanan (LEB) juga telah dibuat dan disampaikan tepat waktu. Dokumen ISO tidak berhubungan langsung dengan P2P namun juga memiliki waktu dalam penyusunan kelengkapan datanya, bukti dokumen telah diverifikasi dan disampaikan tepat waktu adalah sertifikat ISO yang diterima oleh KKP Kelas I Makassar.

- c) Presentase Satker yang menyusun Laporan Keuangan yang tepat waktu dan taat dengan peraturan Keuangan Negara yang berlaku sebesar 100%. Laporan Keuangan disusun per semester sehingga capaian dokumennya sebanyak 2 dokumen dan telah disusun tepat waktu serta sesuai dengan peraturan Keuangan Negara.
- d) Persentase Layanan Kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP sebesar 100%. Dokumen yang mendukung target RAP ini adalah Laporan BMN KKP Kelas I Makassar dan telah mencapai target 100%.
- e) Persentase Satker yang menyusun Laporan Realisasi Penggunaan PNBPN yang sesuai dengan aturan yang berlaku sebesar 100%. Target pada KKP Kelas I Makassar adalah Proposal PNBPN dan telah dibuat sesuai aturan.
- f) Persentase layanan administrasi kepegawaian sebesar 100%. Target KKP Kelas I Makassar adalah penyusunan kontrak dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dari 134 pegawai (sesuai data SIMKA tahun 2019) semua pegawai telah menyusun kontrak kerja tahun 2019 dan penilaian SKP tahun 2018.
- g) Persentase Satker Program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi sebesar 100 % dengan target 90 %. Semua dokumen dalam menjadi target capaian KKP Kelas I Makassar telah menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi. Dokumen e-Monev DJA dan e-Monev Bappenas merupakan salah satu dokumen yang telah menggunakan pengelolaan data dan informasi berbasis data internet dan dapat dimonitoring langsung oleh pusat.

Grafik III.22 Perbandingan Capaian Indikator Ke-10 KKP Kelas I Makassar Tahun 2018 dengan Tahun 2019



Grafik III.23 Perbandingan Capaian Indikator Ke-10 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



- 5) Analisis Keberhasilan Kegiatan
 - a) Pencapaian indikator jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan karena dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen rutin yang dibuat setiap tahun.

- b) Untuk Dokumen Lapkin, Profil, Laporan Keuangan dan BMN dibentuk tim untuk penyusunan dokumen yang ditetapkan dengan SK Kepala KKP Kelas I Makassar.
 - c) Rekonsiliasi data PNBP dengan data di aplikasi Sinkarkes setiap bulan dilakukan untuk semua Wilker.
 - d) Monitoring realisasi capaian kinerja dan anggaran per bulan selama tahun 2019.
 - e) Proses perhitungan dan pengolahan data menggunakan kertas kerja sebelum di entry ke dalam Aplikasi e-Monev DJA, e-Monev Bappenas dan e-Performance Kemenkes.
 - f) Dokumen ISO dimasukkan dalam capaian karena merupakan dokumen yang termasuk mendukung pelaksanaan tugas teknis, meskipun dalam definisi operasional yang diberikan oleh Ditjen P2P tidak disebutkan dokumen ISO karena DO tersebut merupakan standar untuk semua KKP dan tidak semua KKP melaksanakan Surveilans ISO.
- 6) Masalah yang dihadapi
- a) Kurangnya informasi detail terkait pengisian data melalui aplikasi e-Monev DJA dan e-Mones Bappenas.
 - b) Target PNBP yang telah dituangkan dalam Dokumen Proposal PNBP yang tidak tercapai sebagai akibat penerapan Permenkes No. 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional, sehingga mengakibatkan penundaan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang telah ditetapkan.
- 7) Usul pemecahan masalah
- a) Perlu adanya peningkatan kapasitas berupa bimbingan teknis terkait entry data ke dalam aplikasi e-Monev DJA dan e-Mones Bappenas.

b) Penyesuaian target PNBPN dengan estimasi jumlah layanan tahun 2020.

8) Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dalam penyusunan LAPKIN dan Profil melibatkan semua bidang yang pelaksanaannya dilakukan di KKP Kelas I Makassar, sehingga meminimalisir waktu dan biaya dalam penyusunannya.

b. Realisasi Anggaran

Tabel III.34 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kesepuluh Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Langganan internet service provider	300.000.000	299.819.989	99,94 %
2	Penyusunan RKA-KL	97.100.000	93.970.100	96,45 %
3	Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan anggaran dan revisi anggaran	97.100.000	97.090.800	99,99 %
4	Penyusunan target dan pagu PNBPN / kordinasi PNBPN	19.269.000	19.254.500	99,92%
5	Penyusunan laporan pelaksanaan program	138.070.000	138.003.387	99,95 %
6	Penyusunan Laporan E Monev	7.210.000	7.202.200	99,89 %
7	Penyusunan Laporan Tahunan satker	6.030.000	6.030.000	100 %
8	Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja	15.940.000	9,580.000	60,10 %
9	Evaluasi SAKIP	24.000.000	24.000.000	100 %
10	Penyusunan profil dan media KIE	60.190.000	58.960.500	97,96 %
11	Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan/Triwulan/ Semester/Tahunan	48.000.000	47.999.800	100 %
12	Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT, Dekon Tahun 2017 dan Semester I TA 2018	73.150.000	71.927.648	98,33 %
13	Rekonsiliasi Pengelolaan PNBPN	124.260.000	124.101.000	99,87 %
14	Koordinasi Pengelolaan PNBPN	8.675.000	8.664.000	99,87 %
15	Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban Keuangan	53.250.000	49.598.500	93,14 %
16	Upaya Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan	32.800.000	31.595.000	96,33 %
17	Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai	16.960.000	15.834.000	93,36 %
18	Layanan Mutasi Kepegawaian	6.440.000	6.431.500	99,87 %

19	Pelayanan Hukum	32.310.000	29.425.600	91,07 %
20	Pengelolaan Rumah Tangga	72.000.000	57.720.000	80,17 %
21	Layanan Organisasi Tatalaksana	341.795.000	318.034.063	93,05 %
22	Pengelolaan BMN	55.519.000	53.999.700	97,26 %
23	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	16.936.465.000	16.825.655.800	99,35 %
24	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	244.470.000	236.043.398	96,55 %
25	Pengadaan pakaian dinas	210.368.000	204.899.400	97,40 %
26	Pengadaan pakaian kerja dokter/satpam/sopir/tenaga lainnya	30.636.000	29.808.900	97,30 %
27	Pemeliharaan gedung dan bangunan	713.513.000	706.469.450	99,01 %
28	Pemeliharaan/perbaikan peralatan/mesin kantor	99.304.000	67.306.300	67,78 %
29	Pemeliharaan kendaraan R4	362.400.000	345.654.058	95,38 %
30	Pemeliharaan kendaraan R2	15.000.000	5.069.017	33,79 %
31	Perbaikan peralatan fungsional	6.078.000	0	0
32	Langganan daya dan jasa	478.000.000	427.414.508	89,42 %
33	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	15.000.000	6.374.000	42,49 %
34	Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja	446.580.000	429.980.000	96,28 %
35	Honor petugas pramubakti, pengamanan kantor, sopir dan cleaning service	1.198.000.000	1.170.000.000	97,66 %
36	Sewa gedung/kantor/wilker	36.000.0000	33.771.356	93,81 %
37	Sewa rumah jabatan	30.000.000	30.000.000	100 %
38	Kalibrasi alat-alat kesehatan	9.000.000	680.000	7,56 %
39	Pas pelabuhan/bandara	40.002.000	39.643.607	99,10 %
40	Cleaning services	58.652.000	56.603.450	96,51 %
41	Sewa Mesin Fotocopy	8.400.000	8.400.000	100 %
42	Pengadaan Tirai/Gorden	205.535.000	195.406.000	95,07 %
43	Sewa Kendaraan Operasional	38.500.000	37.800.000	98,18 %
44	Pemeriksaan Kesehatan ASN	151.800.000	148.895.000	98,09 %
45	Dokumen Izin/ Upaya Pengelolaan Lingkungan	32.000.000	0	0
Total		22.996.103.000	22.575.116.531	98,17 %

Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 22.575.116.531,- (98,17%). Realisasi anggaran yang tinggi telah sejalan dengan pencapaian target kinerja.

11. INDIKATOR KESEBELAS

Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

Target jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P pada tahun 2019 adalah sebanyak 17 jenis peningkatan kapasitas SDM.

Jenis peningkatan kapasitas SDM sesuai target indicator tahun 2019 meliputi :

- Orientasi petugas KKP dalam Pengendalian Penyakit Menular Berbahaya di Pintu Masuk Negara;
- Table Top Exercise di Bandara Hasanuddin
- Table Top Exercise di Pelabuhan Bajoe Bone
- Workshop Simkespel
- Diklat teknis bidang surveilans dan karantina kesehatan
- On Job Training Pengawasan Kualitas Lingkungan (A)
- On Job Training Pengawasan Kualitas Lingkungan (B)
- Peningkatan kompetensi petugas teknis sanitasi lingkungan (A)
- Peningkatan kompetensi petugas teknis sanitasi lingkungan (B)
- Pelatihan ATLS / GELS
- Pelatihan BTCLS
- Mengikuti pertemuan, Seminar, Kursus yang berhubungan dengan pengendalian vector
- Diklat Pengendalian Vektor & BPP
- Peningkatan Kompetensi (A)
- Peningkatan Kompetensi (B)
- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Barang dan Jasa
- Workshop Pelayanan Prima dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Publik

a. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pengertian

Jumlah jenis peningkatan kapasitas SDM yang diikuti maupun dilaksanakan oleh KKP Kelas I Makassar.

2) Definisi Operasional

Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM KKP dalam kurun waktu satu tahun

3) Rumus (cara perhitungan)

Akumulasi jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM KKP dalam kurun waktu satu tahun.

$$\frac{\text{Jumlah realisasi jenis peningkatan kapasitas SDM}}{\text{Target jenis peningkatan kapasitas SDM}} \times 100\%$$

4) Capaian Kinerja

$$\frac{19}{17} \times 100\% = 111,76 \%$$

Capaian realisasi jenis peningkatan kapasitas SDM sebanyak 19 jenis dari target 17 jenis peningkatan kapasitas SDM (111,76%). Adapun 19 jenis kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan yakni :

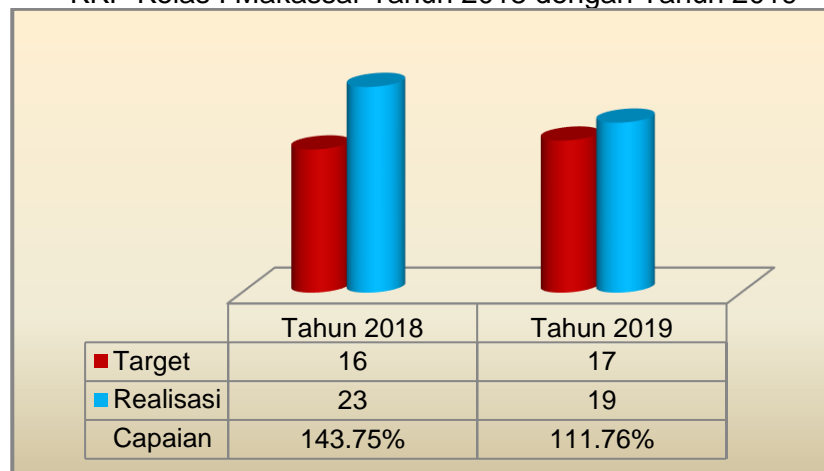
- a) Orientasi Petugas KKP dalam Pengendalian Penyakit Menular Berbahaya di Pintu Masuk Negara
- b) Table Top Exercise di Bandara Hasanuddin
- c) Table Top Exercise di Bajoe Bone
- d) Pelatihan Vaksinologi
- e) Diklat teknis bidang surveilans dan karantina kesehatan
- f) On Job Training Pengawasan Kualitas Lingkungan (A) berupa Pelatihan sistem informasi geografi (SIG) di BBPK Batam
- g) On Job Training Pengawasan Kualitas Lingkungan (B) berupa OJT Air Ballast Kapal di Dockin Kodja Tanjung Priok Jakarta
- h) Peningkatan kompetensi petugas teknis sanitasi lingkungan (A) berupa Workshop kesehatan lingkungan dan pencapaian target TPM di Wilker KKP

- i) Peningkatan kompetensi petugas teknis sanitasi lingkungan (B) berupa Diklat kajian lingkungan hidup strategis
- j) Pelatihan ATLS / GELS
- k) Pelatihan BTCLS
- l) Mengikuti Pertemuan, Seminar, Kursus yang Berhubungan dengan Pengendalian Vektor
- m) Diklat Pengendalian Vektor & BPP
- n) Peningkatan Kompetensi (A) berupa bimbingan teknis Perpajakan.
- o) Peningkatan Kompetensi (B) berupa :
 - (1) Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Petunjuk Teknis dari Perpres tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - (2) Bimtek penatausahaan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan instansi pemerintah mengenai bagan akun standar (BAS) dan SBM
- p) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Barang dan Jasa
- q) Workshop Pelayanan Prima dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Publik
- r) Diklat Jabfung Entomolog
- s) Diklat PPGD

Dalam indikator yang ada dalam Rencana Aksi Program (RAP) tidak disebutkan indikator yang membahas tentang peningkatan SDM, namun pada dasarnya peningkatan SDM tentu menunjang pencapaian keseluruhan indikator yang ada dalam RAP. SDM adalah pelaksana kegiatan. Target tidak tercapai jika pelaksana kegiatan tidak memiliki kinerja yang baik sehingga indikator ini

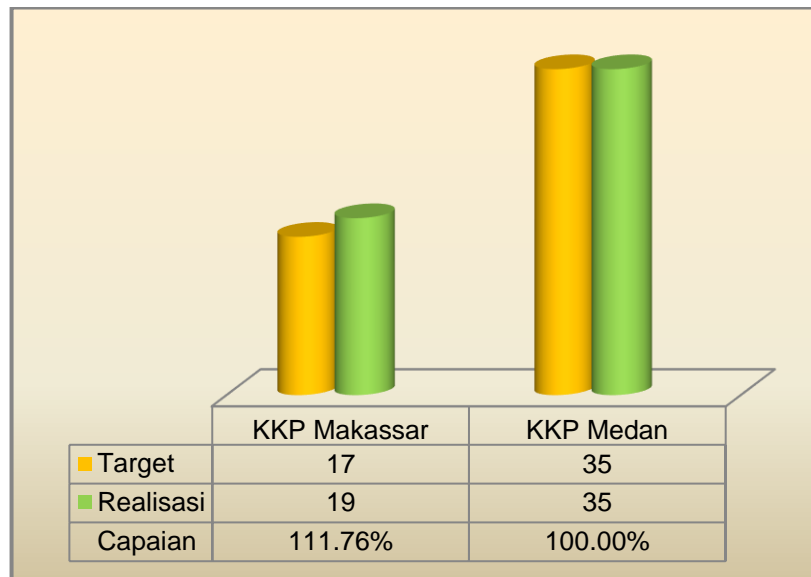
merupakan indikator standar untuk semua KKP termasuk KKP Kelas I Makassar.

Grafik III.24 Perbandingan Capaian Indikator Ke-11 KKP Kelas I Makassar Tahun 2018 dengan Tahun 2019



Grafik III.24 tergambar bahwa untuk indikator ke-11 capaian indikator melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2019 kelebihan target sebanyak 2 jenis yaitu Pelatihan Jabatan Fungsional Entomolog dan Diklat PPGD. Hal ini disebabkan karena beberapa diklat yang diikuti oleh pegawai KKP Kelas I Makassar bersumber dari anggaran penyelenggara diklat, sehingga sisa anggaran peningkatan SDM yang ada di KKP Kelas I Makassar tahun 2019 dapat digunakan untuk penyelenggaraan diklat yang tidak ditargetkan di tahun 2019.

Grafik III.25 Perbandingan Capaian Indikator Ke-11 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



- 5) Analisis Keberhasilan Kegiatan
 - a) Masing-masing Bagian dan Bidang secara aktif mencari jenis dan jadwal pelaksanaan diklat untuk peningkatan kapasitas baik yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah maupun Swasta.
 - b) Tersedianya anggaran yang mendukung untuk peningkatan kapasitas dari masing-masing Bagian dan Bidang.

- 6) Masalah yang dihadapi
 - a) Terbatasnya jumlah peserta diklat yang berhubungan dengan Tupoksi KKP yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah.
 - b) Kurangnya jenis diklat terkait Tupoksi KKP yang dilaksanakan oleh Lembaga Swasta.

- 7) Usul pemecahan masalah
 - a) Mengusulkan jenis dan jumlah peserta diklat ke Ditjen P2P Kemenkes RI.
 - b) Berkoordinasi dengan Lembaga Swasta terkait jenis Diklat yang dibutuhkan.

- 8) Analisis Efisiensi Sumber Daya

- a) Pelaksanaan diklat tidak hanya dilaksanakan di luar Makassar, namun dapat juga dilaksanakan di Makassar, sehingga dapat meminimalisir biaya operasional dari kegiatan diklat.
- b) Adanya kerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar dalam pelaksanaan diklat.

b. Realisasi Anggaran

Tabel III.35 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kesebelas Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Table Top Exercise di Bandara Hasanuddin	39.435.000	38.516.500	97,67 %
2	Table Top Exercise di Pelabuhan Bajoe Bone	39.920.000	39.021.000	97,75 %
3	Diklat teknis bidang surveilans dan karantina kesehatan	25.033.000	17.589.905	70,27 %
4	On Job Training Pengawasan Kualitas Lingkungan	54.302.000	53.468.997	98,47 %
5	Peningkatan kompetensi petugas teknis sanitasi lingkungan	43.069.000	42.311.113	98,24 %
6	Pelatihan ATLS / GELS / Seminar /Pertemuan Ilmiah / ACLS	15.020.000	14.545.000	96,84 %
7	Pelatihan BTCLS	5.080.000	5.080.000	100 %
8	Orientasi PPGD	25.420.000	22.516.600	88,58 %
9	Bimtek Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah Kerja	153.200.000	150.653.000	98,34 %
10	Mengikuti pertemuan, Seminar, Kursus yang berhubungan dengan pengendalian vektor	27.870.000	24.034.746	86,24 %
11	Konsultasi Persiapan Diklat Pengendalian Vektor & BPP	12.550.000	12.516.000	99,73 %
12	Diklat Pengendalian Vektor & BPP	492.142.000	489.199.784	99,40 %

13	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Diklat	111.592.000	111.023.896	99,49 %
14	Diklat Jabfung Entomolog	44.628.000	22.005.600	49,31 %
15	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	100.010.000	94.083.208	94,07 %
16	Workshop Pelayanan Prima dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Sosialisasi Penyusunan Strategi Komunikasi KKP Kelas I Makassar	79.240.000	70.440.500	88,90 %
Total		1.317.691.000	1.256.182.449	95,33 %

Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 1.256.182.449 (95,33 %). Realisasi anggaran yang tinggi telah sejalan dengan pencapaian target kinerja.

12. INDIKATOR KEDUA BELAS

Jumlah pengadaan sarana prasarana

Target Jumlah pengadaan sarana prasarana pada tahun 2019 adalah sebanyak 232 unit yakni :

- Pengadaan ambulance 2 unit
- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 15 unit
- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran sebanyak 173 unit
- Pengadaan kelengkapan alat kesehatan sebanyak 42 unit

a. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pengertian

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar pada tahun 2019.

2) Definisi Operasional

Jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu tahun

3) Rumus (cara perhitungan)

Akumulasi jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu tahun

$$\frac{\text{Jumlah pengadaan sarana prasarana}}{\text{Jumlah target pengadaan sarana prasarana}} \times 100\%$$

4) Capaian Kinerja

$$\frac{233}{232} \times 100\% = 100,43 \%$$

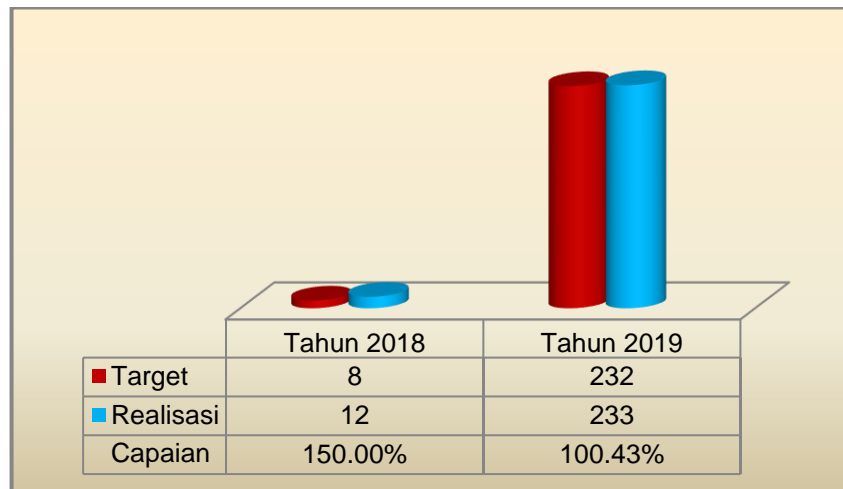
Capaian realisasi indikator jumlah pengadaan sarana prasarana KKP Kelas I Makassar tahun 2019 sebanyak 233 unit dari target 232 unit (100,43 %). Adapun sarana prasarana yang diadakan pada tahun 2019 yakni :

- a) Pengadaan ambulance 2 unit
- b) Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 15 unit
- c) Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran sebanyak 173 unit
- d) Pengadaan kelengkapan alat kesehatan sebanyak 43 unit

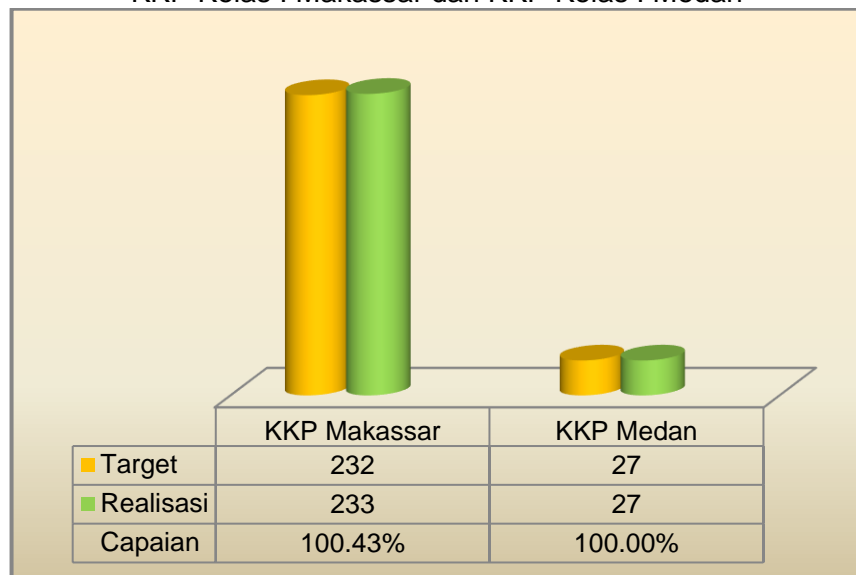
Adapun realisasi melebihi 100% karena adanya pengadaan kelengkapan alat kesehatan berupa timbangan digital dengan target cuma 1 unit, namun pengadaan berjumlah 2 unit.

Indikator kinerja ini mendukung indikator yang ada pada Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen P2P yakni Persentase Satker UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran untuk memenuhi standar sebesar 69 % di tahun 2019.

Grafik III.26 Perbandingan Capaian Indikator Ke-12 KKP Kelas I Makassar Tahun 2018 dan Tahun 2019



Grafik III.27 Perbandingan Capaian Indikator Ke-12
KKP Kelas I Makassar dan KKP Kelas I Medan



- 5) Analisis Keberhasilan Kegiatan
- Pelaksanaan pengadaan disesuaikan dengan jadwal yang ada dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).
 - Dilakukannya monitoring setiap bulan terhadap pengadaan barang dan jasa.
 - Capaian melebihi target karena terdapat alat kesehatan yang mengalami efisiensi harga sehingga dapat ditingkatkan kuantitasnya.

- 6) Masalah yang dihadapi
 - a) Belum adanya jabatan fungsional teknis untuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
 - b) Terbatasnya *supplier*/penyedia untuk bahan kesehatan jenis tertentu.

- 7) Usul pemecahan masalah
 - a) Pengusulan jabatan fungsional teknis Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam peta jabatan KKP Kelas I Makassar.
 - b) Pengusulan untuk pengangkatan jabatan fungsional teknis Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c) Proses pengadaan terhadap bahan kesehatan tertentu dengan *supplier* terbatas dilaksanakan pada awal tahun anggaran.

- 8) Analisis Efisiensi Sumber Daya

Proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan kendaraan roda empat (*ambulance*).

b. Realisasi Anggaran

Tabel III.36 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Keduabelas Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Pengadaan kendaraan bermotor	630.000.000	589.200.000	93,52 %
2	Pengadaan perangkat pengolah data untuk penerbitan dokumen online	102.000.000	101.985.000	99,99 %
3	Peralatan dan fasilitas perkantoran	453.200.000	452.983.300	99,94 %
4	Pengadaan kelengkapan poliklinik/ Laboratorium	175.250.000	173.810.430	99,18 %

Total	1.360.450.000	1.317.933.730	96,87%
--------------	----------------------	----------------------	---------------

Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 1.317.933.730,- (96,87 %). Realisasi anggaran yang tinggi telah sejalan dengan pencapaian target kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KKP Kelas I Makassar tahun 2019 merupakan tanggungjawab semua bidang dan bagian dalam mencapai target kinerja berdasarkan indikator yang berhubungan dengan kegiatannya. LAKIP ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan diharapkan terjadi peningkatan dalam pencapaian indikator kinerja tiap tahunnya, karena itu pula KKP Kelas I Makassar terus melakukan pembenahan dalam internal organisasinya untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan.

Pencapaian indikator Lakip tahun 2019 secara keseluruhan dapat merealisasikan program dan kegiatan pada tahun 2019 sesuai dengan yang terdapat dalam Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019. Terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target, namun rata-rata pencapaian indikator kinerja tahun 2019 di atas 100 % yaitu sebesar 111,41 %.

Keberhasilan pencapaian indikator di tahun 2019 didukung dengan tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, optimalisasi sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan lintas sector, juga sebagai acuan untuk peningkatan capaian kinerja di masa yang akan datang.

Untuk tahun-tahun mendatang terhadap indikator yg tercapai tetap menjalankan strategi dan diperlukan pengembangan inovasi sebagai pengungkit capaian kinerja di masa akan datang.

PUSTAKA ACUAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KKP Kelas I Makassar tahun anggaran 2019

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) KKP Kelas I Makassar, tahun 2019

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KKP Kelas I Makassar, KKP Kelas I Makassar tahun 2018

Laporan Keuangan KKP Kelas I Makassar tahun 2019

Peraturan MENPAN-RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Permenkes RI No. 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Permenkes RI No. 2348/Menkes/PER/XII/2011 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas I Makassar Tahun 2015-2019, KKP Kelas I Makassar Tahun 2019

PENYUSUN

- Pengarah : dr. Darmawali Handoko, M. Epid
- Penanggung Jawab : Nirwan SKM, M. Kes
- Ketua : Yusrianto, SKM
- Wakil Ketua : Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid
- Sekretaris : Arni Angriany Amir, ST
- Anggota :
1. Dra. Aisyah Sufrie, MSc.PH
 2. dr. Muh. Haskar Hasan, M.Kes
 3. Amran, SKM, M.Kes
 4. Hj. Sukarni, SKM, M.Kes
 5. Nurdin, SKM
 6. Masnar, AMd.KL, SE
 7. Markus Minggu, SKM, M.Kes
 8. Hj. Jumuriah, SKM, M.Kes
 9. dr. Andi Lukman Hakim Amin
 10. Kaimuddin, AMd.KL
 11. Nurhayati HL, SKM
 12. Nurdiansah Sahrir, SKM
 13. Ismainar, AMK
 14. Risma Tangnga Guling, AMK
 15. dr. H. Abbas Zavey Nurdin, Sp.OK, MKK
 16. Andi Ali Resa, SKM, M.Kes
 17. H.Nur Kamar, SKM, M.Kes
 18. Hj. Nur Magfirah, SKM
 19. Turbowo, SKM, M.Kes
 20. Arfiani, SKM
 21. Nining Ayu Purnama, S.Kom
 22. Mahli Sunusi, SKM
 23. Saydaturrizki, AMd.Ak

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Darmawali Handoko, M.Epid
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anung Sugihantono, M.Kes
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 26.660.063.000, berjanji akan mewujudkan realisasi anggaran minimal 95% dan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama,


dr. Anung Sugihantono, M.Kes
NIP 196003201985021002


dr. Darmawali Handoko, M.Epid
NIP. 196911252002121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR
TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	15715 Sertifikat
		2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100 %
		3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	1253 Dokumen
		4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	9 Lokasi
		5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	4 Lokasi
		6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	41630 Sertifikat
		7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	7 Lokasi
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic	8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	7 Lokasi
3	Menurunnya penyakit menular langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	2325 Orang
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	48 Dokumen
		11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	17 Jenis
		12. Jumlah pengadaan sarana prasarana	4 Paket

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR
TAHUN 2019

NO	OUTPUT RKAKL	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB	36 Layanan	Rp. 242.652.000
	a. Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB di KKP	1 Layanan	Rp. 171.427.000
	b. Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	35 Layanan	Rp. 71.225.000
2	Layanan Kekejarantinaan Kesehatan	1262 Layanan	Rp. 4.252.390.000
	a. Layanan Pelaksanaan Kekejarantinaan Kesehatan di KKP	10 Layanan	Rp. 3.676.820.000
	b. Layanan Kekejarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC	82 Layanan	Rp. 39.360.000
	c. Layanan Kekejarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate of pratique)	50 Layanan	Rp. 27.500.000
	d. Layanan Kekejarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	730 Layanan	Rp. 409.530.000
	e. Layanan Kekejarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)	175 Layanan	Rp. 65.450.000
	f. Layanan kekejarantinaan pengawasan tindakan penyehatan alat angkut	15 Layanan	Rp. 2.730.000
	g. Layanan Pemeriksaan P3K Kapal	200 Layanan	Rp. 31.000.000
3	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	2 Layanan	Rp. 83.345.000
4	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	405 Layanan	Rp. 1.248.555.000
	a. Layanan Pelaksanaan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBD	1 Layanan	Rp. 1.044.447.000
	b. Layanan Pengendalian Vektor DBD	50 Layanan	Rp. 42.750.000
	c. Layanan Survey Vektor Pes	24 Layanan	Rp. 49.728.000
	d. Layanan Pengendalian Vektor Diare	30 Layanan	Rp. 12.810.000
	e. Layanan Pengendalian Vektor Malaria	5 Layanan	Rp. 6.135.000
	f. Layanan Survei Vektor DBD	250 Layanan	Rp. 41.250.000
	g. Layanan Survei Vektor Diare	15 Layanan	Rp. 4.725.000
	h. Layanan Survei Vektor Malaria	30 Layanan	Rp. 46.710.000
5	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	16 Layanan	Rp. 134.382.000
	a. Deteksi Dini HIV AIDS	1 Layanan	Rp. 93.507.000
	b. Deteksi Dini HIV AIDS (SBK)	15 Layanan	Rp. 40.875.000
6	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	15 Layanan	Rp. 105.000.000
	a. Layanan Deteksi Dini Terduga TBC (UPT/KKP)	2 Layanan	Rp. 45.785.000
	b. Layanan Deteksi Dini Terduga TBC Wilayah Kerja KKP	13 Layanan	Rp. 59.215.000
7	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	Rp. 1.360.450.000
8	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	Rp. 1.558.830.000
9	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 17.674.459.000
	Total		Rp. 26.660.063.000

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Rp 4.495.042.000,-
2.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Rp 1.331.900.000,-
3.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Rp 239.382.000,-
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp 20.593.739.000,-
Total		Rp 26.660.063.000,-

Jakarta, Desember 2018

Direktur Jenderal P2P

Kepala KKP Kelas I Makassar



dr. Anung Sugihantono, M.Kes
NIP. 196003201985021002



dr. Darmawati Handoko, M.Epid
NIP. 196911252002121003

Perjanjian Kinerja Revisi 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Darmawali Handoko, M.Epid
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anung Sugihantono, M.Kes
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 30.351.307.000, berjanji akan mewujudkan realisasi anggaran minimal 95% dan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua

dr. Anung Sugihantono, M.Kes
NIP. 196003201985021002

/ Pihak Pertama,

dr. Darmawali Handoko, M.Epid
NIP. 196911252002121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR
TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	15715 Sertifikat
		2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100 %
		3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	1253 Dokumen
		4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	9 Lokasi
		5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	4 Lokasi
		6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	41630 Sertifikat
		7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	7 Lokasi
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic	8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	7 Lokasi
3	Menurunnya penyakit menular langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	2325 Orang
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	48 Dokumen
		11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	17 Jenis
		12. Jumlah pengadaan sarana prasarana	232 Unit

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR
TAHUN 2019

NO	OUTPUT RKAKL	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB	36 Layanan	Rp. 242.652.000
	a. Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB di KKP	1 Layanan	Rp. 171.427.000
	b. Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	35 Layanan	Rp. 71.225.000
2	Layanan Kekarantinaan Kesehatan	1262 Layanan	Rp. 4.252.390.000
	a. Layanan Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di KKP	10 Layanan	Rp. 3.676.820.000
	b. Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC	82 Layanan	Rp. 39.360.000
	c. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate of pratique)	50 Layanan	Rp. 27.500.000
	d. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	730 Layanan	Rp. 409.530.000
	e. Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)	175 Layanan	Rp. 65.450.000
	f. Layanan kekarantinaan pengawasan tindakan penyehatan alat angkut	15 Layanan	Rp. 2.730.000
	g. Layanan Pemeriksaan P3K Kapal	200 Layanan	Rp. 31.000.000
3	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	2 Layanan	Rp. 83.345.000
4	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	405 Layanan	Rp. 1.248.555.000
	a. Layanan Pelaksanaan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBD	1 Layanan	Rp. 1.044.447.000
	b. Layanan Pengendalian Vektor DBD	50 Layanan	Rp. 42.750.000
	c. Layanan Survey Vektor Pes	24 Layanan	Rp. 49.728.000
	d. Layanan Pengendalian Vektor Diare	30 Layanan	Rp. 12.810.000
	e. Layanan Pengendalian Vektor Malaria	5 Layanan	Rp. 6.135.000
	f. Layanan Survei Vektor DBD	250 Layanan	Rp. 41.250.000
	g. Layanan Survei Vektor Diare	15 Layanan	Rp. 4.725.000
	h. Layanan Survei Vektor Malaria	30 Layanan	Rp. 46.710.000
5	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	16 Layanan	Rp. 134.382.000
	a. Deteksi Dini HIV AIDS	1 Layanan	Rp. 93.507.000
	b. Deteksi Dini HIV AIDS (SBK)	15 Layanan	Rp. 40.875.000
6	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	15 Layanan	Rp. 105.000.000
	a. Layanan Deteksi Dini Terduga TBC (UPT/KKP)	2 Layanan	Rp. 45.785.000
	b. Layanan Deteksi Dini Terduga TBC Wilayah Kerja KKP	13 Layanan	Rp. 59.215.000
7	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	Rp. 1.360.450.000
8	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	Rp. 1.558.830.000
9	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 21.365.703.000
	Total		Rp. 30.351.307.000

No Kegiatan	Anggaran
1. Surveilans dan Karantina Kesehatan	Rp 4.495.042.000,-
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Rp 1.331.900.000,-
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Rp 239.382.000,-
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp 24.284.983.000,-
Total	Rp 30.351.307.000,-

Jakarta, November 2019

Direktur Jenderal P2P

Kepala KKP Kelas I Makassar




dr. Anung Sugihantono, M.Kes
NIP. 196003201985021002

dr. Darmawati Handoko, M.Epid
NIP. 196911252002121003

Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dan Pendanaan Tahun Anggaran 2015 - 2019
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

No	SASARAN	INDIKATOR RAP DITJEN P2P	INDIKATOR SATKER	TARGET SATUAN					ALOKASI					TOTAL ALOKASI	PENANGGUN G JAWAB	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas I Makassar								18,048,304,000	27,688,002,000	25,352,556,000	31,786,112,000	26,660,063,000	136,250,391,600		
1.	Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra								4,699,808,000	6,110,831,000	4,555,128,000	4,649,991,000	4,495,042,000	24,898,248,550		
	Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra	I	Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direpson	1	Persentase ABK/crew dan penumpang alat angkut yang datang dari luar negeri dilakukan pengamatan	100	100	100							Bidang PKSE	
2			Persentase penanggulangan KLB / PHEIC < 24 Jam	100	100	100									Bidang PKSE	
II		Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	3	Presentase kapal dari luar negeri langsung yang mendapatkan free pratique, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit	100	100	100									Bidang PKSE
			4	Presentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan HPAGD sesuai kondisi selama penerbangan dengan informasi yang benar	50	55	60									Bidang PKSE
	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB			1	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan				16402 Sertifikat	15715 Sertifikat						
2				Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP				100%	100%							
3				Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit				1383 Dokumen	1253 Dokumen							
4				Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus				9 Lokasi	9 Lokasi							

			5	Jumlah pelabuhan/bandara/PLB D yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan ke daruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah				3 Lokasi	4 Lokasi							
			6	Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan				75000 Sertifikat	41630 Sertifikat							
			7	Jumlah pelabuhan/bandara/PLB D yang memenuhi syarat-syarat sanitasi				6 Lokasi	7 Lokasi							
2.	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang										444,375,000	739,377,000	833,404,000	1,434,000,000	1,331,900,000	4,783,056,000
	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang	III.	Persentase Pelabuhan/Bandar yang melakukan pengendalian vektor terpadu	5	Persentase wilker yang melakukan pengendalian vektor terpadu di wilayah perimeter	100	100	100								Bidang PRL
				6	Persentase wilker yang melakukan pengendalian binatang penular penyakit di wilayah perimeter		70	80								Bidang PRL
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic			8	Jumlah pelabuhan/bandara/PLB D bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area				6 Lokasi	7 Lokasi						
3.	Pengendalian Penyakit Menular Langsung										243,695,000	622,097,000	574,752,000	279,200,000	239,382,000	1,959,126,000
	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung	IV	Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung	7	Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung		30	70								Bidang UKLW
	Menurunnya penyakit menular langsung			9	Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung				3630 Orang	2325 Orang						
4.	Pengendalian Penyakit Tidak Menular										361,175,000	404,905,000	104,653,000		-	870,733,000

	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	V	Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular	8	Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular	50	60								Bidang UKLW
	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular		10	Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu				7 Lokasi							
			11	Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP				20 Tempat Kerja							
5.	Penyehatan Lingkungan								625,039,000				625,039,000		
	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	VI	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	9	Persentase sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi	70	70	80							Bidang PRL
				10	Persentase sampel air minum/ air bersih yang memenuhi syarat berdasarkan hasil laboratorium		80	90							
		VII	Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	11	Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	75	80	90							Bidang PRL
				12	Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	50	50	50							Bidang PRL
		VII I	Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	12	Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki sertifikat laik sehat	50	50	50							Bidang PRL
				IX	Persentase Pelabuhan/Bandara sehat	13	Persentase wilker yang melaksanakan program pelabuhan/bandara sehat	40	40	50					
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan								11,674,212,000	19,810,792,000	19,284,619,000	25,422,921,000	20,593,739,000	96,786,283,000	

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	X	Hasil Penilaian SAKIP adalah AA	14	Hasil Penilaian SAKIP	AA	AA	AA								Bagian TU	
	XI	Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya	15	Persentase Wilker yang memiliki gedung milik kemenkes	30	45	45									Bagian TU
			16	Persentase Wilker yang memiliki kendaraan operasional dan atau kendaraan khusus		55	64									
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			10	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				40 Dokumen	48 Dokumen							
			11	Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P				16 Jenis	17 Jenis							
			12	Jumlah pengadaan sarana prasarana				8 Unit	232 Unit							

Sumber : Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2015-2019